

**PENGARUH KEMISKINAN, HARGA ROKOK, PENDAPATAN PERKAPITA DAN
CUKAI ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI INDONESIA TAHUN 1990-2019**

***THE EFFECT OF POVERTY, CIGARETTE PRICE, PER CAPITA INCOME, AND
CIGARETTE EXCISE ON CIGARETTE CONSUMPTION IN INDONESIA***

¹⁾Tin Arifatun Al Fadilah, ²⁾Hadi Sasana, ³⁾Panji Kusuma Prasetyanto

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Abstrak

Indonesia menempati urutan pertama banyaknya jumlah orang dewasa yang merokok di kawasan ASEAN. Konsumsi rokok di Indonesia mengalami kenaikan secara terus menerus walaupun sudah dilakukan kampanye anti rokok. Kondisi ini memberikan makna bahwa konsumsi rokok akan terus meningkat, dan peningkatan disebabkan bertambahnya orang dewasa yang merokok maupun perokok pemula. Konsumsi rokok disatu sisi membahayakan kesehatan bagi perokok, namun disisi lain konsumsi rokok dapat membantu pertumbuhan perekonomian. Konsumsi rokok yang terus meningkat, disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Atas dasar pemikiran tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia tahun 1990 – 2019. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda *double-log*. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kemiskinan, harga rokok dan cukai rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Sedangkan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok.

Kata Kunci : Konsumsi rokok, kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita, cukai rokok

Abstract

Indonesia ranks first in the number of adults who smoke in the ASEAN region. Cigarette consumption in Indonesia has continued to increase despite anti-smoking campaigns. This condition means that cigarette consumption will continue to increase, and the increase is due to the increase in both adult smoking and novice smokers. Cigarette consumption on the one hand endangers health for smokers, but on the other hand cigarette consumption can help economic growth. Cigarette consumption continues to increase, caused by various factors, both internal and external factors. On this basis, the purpose of this study is to analyze the effect of poverty, cigarette prices, per capita income and cigarette excise on cigarette consumption in Indonesia from 1990 to 2019. This study uses a double-log multiple regression analysis tool. The results of the analysis can be concluded that poverty, cigarette prices and cigarette excise have a negative effect on cigarette consumption. Meanwhile, income per capita has no effect on cigarette consumption.

Keywords: Cigarette consumption, poverty, cigarette prices, per capita income, cigarette excise

PENDAHULUAN

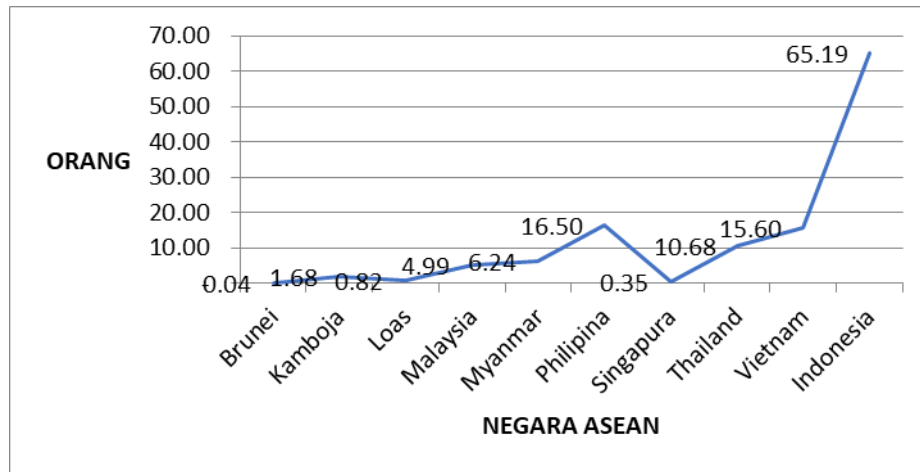
Latar Belakang

Kebiasaan merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap banyak penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, paru, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Peringatan akan potensi terjangkit penyakit-penyakit tersebut telah tercantum pada kemasan rokok, tapi konsumsi produk rokok tetap tergolong tinggi.

Nururrahmah (2014: 100) menemukan bahwa rokok menjadi penyebab 87% kematian akibat kanker paru-paru. Pada wanita, kanker paru-paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Hal ini disebabkan karena dalam tiga puluh tahun terakhir ini, jumlah wanita yang merokok bertambah banyak. Merokok saat ini juga menjadi penyebab dari kegagalan kehamilan, meningkatnya jumlah bayi yang meninggal, dan penyakit lambung kronis. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru yang normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida membentuk karboksihemoglobin daripada membawa oksigen.

Menurut WHO (*World Health Organization*) terdapat sekitar 1 milyar orang di dunia atau sekitar 1/7 dari seluruh populasi manusia di dunia menjadi perokok aktif. Data WHO juga menyebutkan bahwa 80% perokok di dunia berasal dari negara berkembang atau negara berpendapatan menengah dan miskin. Bahkan sebanyak 226 juta perokok masuk dalam kategori tidak mampu. Dengan demikian maka konsumsi rokok tidak berbanding lurus dengan pendapatan finansial pengguna rokok.

Menurut *The Tobacco Control Atlas: ASEAN Region 4th edition* (September 2018) di kawasan ASEAN saat ini terdapat 122 Juta perokok dewasa dan sekitar 65 Juta diantaranya menempati wilayah Indonesia. Lebih dari 15 miliar batang rokok dihisap setiap hari di seluruh dunia dimana 1.327 batang diantaranya dikonsumsi di kawasan ASEAN. Di antara negara-negara ASEAN, prevalensi merokok pria dewasa merokok tertinggi di Negara Indonesia (66%) dan terendah di Negara Singapura (21,1%). Tingkat wanita dewasa merokok sangat tinggi (antara 5,8% dan 8,4%) di Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina.



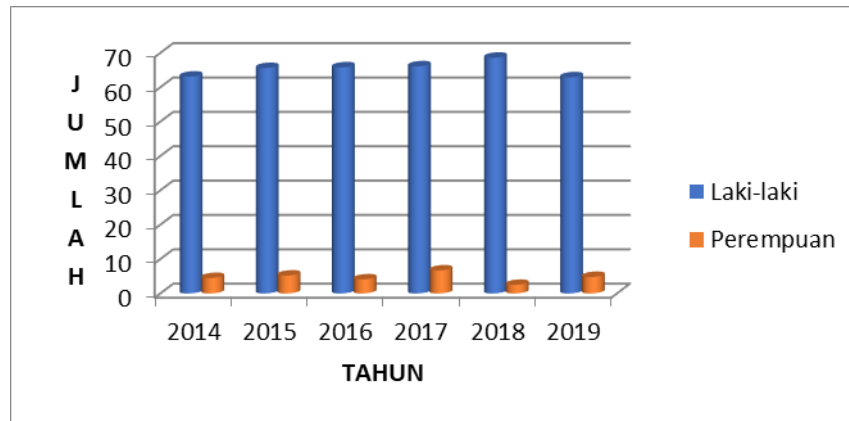
Sumber: The Tobacco Control Atlas Asean Region 4th Edition

Gambar 1. Jumlah Orang Dewasa Merokok di Negara Kawasan ASEAN Tahun 2019 (dalam satuan juta orang)

Berdasarkan Gambar 1. di atas yang diambil dari *The Tobacco Control Atlas Asean Region 4th Edition* (Agustus 2010) Indonesia menempati urutan pertama banyaknya jumlah orang dewasa yang merokok di kawasan Asean dengan jumlah total perokok mencapai 65.188.338 orang yang berarti kurang lebih sekitar 25% dari penduduk Indonesia adalah perokok. Di urutan kedua ditempati oleh negara Pilipina banyaknya penduduk yang mengkonsumsi rokok di Pilipina yaitu sebanyak 16.500.000 orang. Negara Vietnam menempati urutan ketiga dengan jumlah perokok sebanyak 15.602.400 orang. Disusul Negara Thailand di urutan keempat

dengan jumlah perokok sebanyak 10.676.361 orang. Negara Myanmar menempati urutan kelima dengan total jumlah perokok mencapai 6.240.000 orang. Urutan keenam ditempati oleh Malaysia, Cambodia, Laos dan Singapore. Jumlah perokok yang paling sedikit ditempati Negara Brunei sebanyak 39.037 orang.

Di Indonesia dari tahun ke tahun jumlah konsumsi rokok terus mengalami peningkatan. Kurangnya kesadaran akan kesehatan dan kebiasaan merokok sejak dini menyebabkan konsumsi rokok terus meningkat. Bahkan para perokok rela menggunakan sebagian dari penghasilannya untuk mengkonsumsi rokok.



Sumber : Susenas dan Riskesdas 2020

Gambar 2. Perbandingan Perokok laki-laki dan perempuan (dalam satuan juta) di Indonesia Tahun 2014 – 2019 (dalam satuan juta orang)

Pada Gambar 2. diatas menunjukkan jumlah prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dari data tersebut diketahui prevalensi konsumen laki-laki paling tinggi pada tahun 2019 yang mencapai 68,1% dan prevelensi konsumen laki-laki paling rendah pada tahun 2019 dengan nilai prevelensi 62,9, sedangkan prevalansi konsumen perempuan paling tinggi pada tahun 2017 yang mencapai 6,7% dan nilai prevelensi konsumen paling rendah pada tahun 2018 dengan nilai prevelensi 2,5%.

Data dari Riset Kesehatan Dasar 2019 (Riskesdas) juga menunjukkan konsumsi rokok pada anak-anak (usia 10-18 tahun) meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2014 prevalensi merokok pada anak-anak menunjuk pada angka 7,2%, lalu pada tahun 2017 jumlah prevalensi merokok pada anak mengalami kenaikan menjadi 8,8%, dan kemudian jumlah prevalensi merokok pada anak menyentuh nilai 9,1% pada tahun 2019. Angka-angka ini cukup tinggi dan mengawatirkan bagi Negara Indonesia.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Menurut Kelompok Makanan Tahun 2014-2019 (dalam satuan rupiah)

Kelompok Makanan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Desa + Kota	Desa + Kota	Desa + Kota	Desa + Kota	Desa + Kota	Desa+ Kota
Padi	695 472	722 820	803 148	774 792	737 455	803 232
Tembakau	527 160	589 224	619 296	762 660	787 028	785 269
Sayuran	373 896	360 816	328 380	414 060	508 768	475 966
Ikan	340 272	382 188	384 492	403 440	485 733	520 227
Telur dan Susu	258 480	287 076	319 392	336 300	352 283	386 355

Buah-buahan	196 548	230 916	242 088	231 216	274 201	341 832
Daging	159 024	179 760	216 576	246 312	299 850	276 067
Bahan Minuman	160 620	161 532	176 748	192 228	204 933	205 941
Konsumsi Lainnya	87 624	93 216	108 096	113 316	130 906	122 858

Sumber : BPS 2020, diolah

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat diketahui data pengeluaran perkapita menurut kelompok makanan dari tahun 2014-2019 bahwa pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia paling banyak terletak pada komoditas padi-padian, dan selalu meningkat disetiap tahunnya mengingat padi adalah bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Posisi pengeluaran perkapita terbanyak nomor dua terletak pada komoditas Tembakau yang merupakan bahan baku untuk pembuatan rokok ini mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya. Komoditas penghasil nikotin ini sangat banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tidak sedikit orang rela menysihkan penghasilannya hanya untuk mengkonsumsi tembakau terutama rokok. Bahkan pengeluaran perkapita untuk komoditas Tembakau lebih tinggi dari komoditas sayuran yang menempati posisi ketiga. Komoditas sayuran ini walaupun mengalami kenaikan di tahun 2014 hingga 2015 namun kenaikannya tidak signifikan seperti komoditas tembakau. Bahkan pada tahun

2015 hingga 2016 komoditas sayuran ini sempat mengalami penurunan namun dari tahun 2016 hingga 2018 komoditas sayuran mengalami kenaikan kembali. Komoditas Ikan yang menempati posisi keempat juga mengalami peningkatan setiap tahunnya namun peningkatannya tidak signifikan. Telur dan Susu menempati posisi kelima rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia. Buah-buahan dan Daging menempati posisi keenam dan ketujuh dalam pengeluaran perkapita pertahun.

Komoditi makanan memiliki peran lebih besar daripada komoditi non makanan dalam menyumbang kemiskinan di Indonesia. Menurut BPS rokok merupakan penyumbang angka kemiskinan di Indonesia kedua setelah padi. Rokok bukan termasuk bahan pokok namun banyak dikonsumsi oleh masyarakat baik masyarakat desa maupun masyarakat kota. Ironisnya, rokok lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Indonesia. Menurut penelitian *Indonesian Forum Parliamentarians for Population and Development* (IFPPD) dua dari tiga kepala keluarga di Indonesia mengonsumsi rokok.

Diperkirakan, sebanyak 12 juta kepala keluarga dari 19 juta keluarga miskin adalah perokok aktif. Di Indonesia sendiri pada kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah tingkat jumlah konsumsi rokok sangat tinggi dibanding pada kalangan masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Keluarga miskin menganggap kebutuhan rokok lebih penting dari pada kebutuhan makanan lain yang nilai gizinya tinggi, bahkan beberapa orang rela mengurangi jumlah konsumsi makanan pokok demi untuk menghisap sebatang rokok.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)		
	Kota	Desa	Desa+ Kota
2014	20,960.02	35,660.51	56,620.53
2015	20,863.89	35,143.90	56,007.79
2016	21,272.50	35,833.86	57,106.36
2017	20,825.41	34,944.30	55,769.71
2018	20,946.38	33,407.83	54,354.21
2019	20,275.65	31,348.74	51,624.39

Sumber : BPS 2020

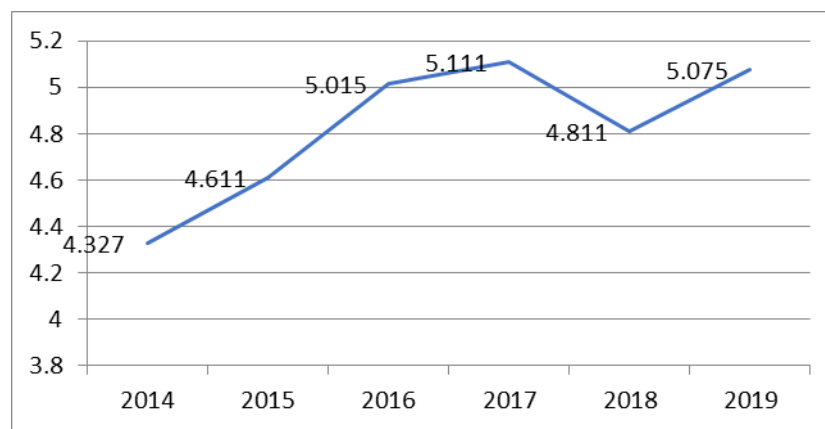
Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 mengalami penurunan terkecuali pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin desa dan kota di Indonesia sebanyak 56,62 juta orang. Pada tahun 2015 menurun sebanyak 61 juta orang. Namun pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin desa dan kota di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,09 juta orang sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 57,10 juta orang. Tahun 2017 jumlah penduduk miskin desa dan kota di Indonesia kembali mengalami

penurunan sebanyak 1,33 juta orang menjadi 55,77 sama halnya dengan tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 54,35 juta orang miskin desa dan kota di Indonesia. Salah satu penyebab kenaikan garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016 yaitu kenaikan harga bahan makanan. Menurut BPS kontribusi bahan makanan terhadap kenaikan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada hubungannya antara tingkat kemiskinan dengan tingkat konsumsi rokok.

Peningkatan kemiskinan justru akan meningkatkan konsumsi rokok seseorang. Rokok memiliki zat berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menurunkan tingkat kesehatan dan produktivitas seseorang. Hasil penelitian Sivana (2010: 11) menunjukkan bahwa kenaikan harga tembakau domestik akan menurunkan permintaan tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa ketika harga semakin meningkatkan, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Namun apabila harga barang menurun, maka jumlah produk atau barang yang diminta akan semakin bertambah atau meningkat. Berbeda halnya dengan

penelitian yang dilakukan oleh Odhiambo (2009: 19) yang menjelaskan bahwa harga rokok berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan rokok. Hubungan kedua variabel bersifat negatif atau bertolak belakang. Hasil ini mempunyai implikasi bahwa setiap terjadi kenaikan harga rokok, maka tingkat permintaan rokok akan mengalami penurunan. Permintaan rokok akan mengalami kenaikan apabila harga rokok menurun. Tingkat permintaan rokok menurut World Bank selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : World Bank 2019, diolah

Gambar 3. Harga Rokok dalam US\$ Tahun 1990-2019

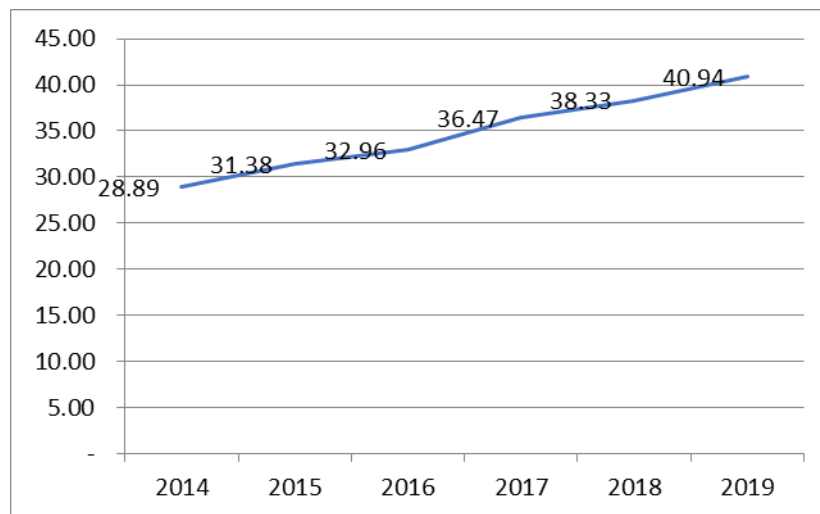
Berdasarkan publikasi data *World Bank* tahun 2020 di atas dari tahun 2014 hingga tahun 2019 harga rokok mengalami kenaikan terkecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan harga rokok. Pada tahun 2014 harga rokok sebesar US\$ 4,327

kemudian pada tahun 2015 naik sebesar US\$ 0,284 menjadi US\$ 4,611. Pada tahun 2016 harga rokok naik signifikan menjadi US\$ 5,015. Tahun 2017 harga rokok menjadi harga tertinggi dari tahun 2014 hingga 2019 dengan harga US\$ 5,111

namun pada tahun 2018 harga rokok mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar US\$ 0,301 menjadi US\$ 4,81 dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi US\$ 5,075.

Studi yang dilakukan Marisca (2016: 12) menjelaskan hasil penelitian dimana tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi rokok. Konsumsi rokok akan meningkat seiring meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam studi yang dilakukan Halifah (2012: 17) bahwa masyarakat dari kalangan miskin justru mengkonsumsi rokok lebih banyak. Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk membeli rokok.

Dalam fungsi konsumsi yang dilakukan Keynes, besarnya kenaikan pengeluaran konsumsi sangat dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Pada penelitian Woyanti (2011: 17) menjelaskan hasil penelitian bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok. Semakin tinggi pendapatan riil seseorang akan mendorong orang tersebut untuk mengkonsumsi rokok lebih banyak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017: 21) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi rokok seseorang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4. Pendapatan Perkapita Indonesia Tahun 2014-2019 (dalam satuan juta rupiah)

Menurut Gambar 4 di atas, pendapatan per kapita di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2019 selalu

mengalami kenaikan yang signifikan. pada tahun 2019 pendapatan per kapita di Indonesia mencapai titik tertinggi yaitu Rp.

40.916.368,2 sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah.

Menurut penelitian dari Adioetomo, Triarsih dan Hendratno (2005: 23) mengatakan bahwa pemerintah berhati-hati dalam menaikkan harga cukai rokok karena akan membuat proporsi pendapatan rumah tangga pengeluaran rokok akan tinggi. Penelitian Hendra (2013: 14) juga mengatakan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok. Konsumsi rokok tetap meningkat walaupun harga rokok naik ini dikarenakan terdapat zat adiktif pada rokok.

Hasil penelitian Goel (2014: 11) ada hubungannya antara tingkat produksi dengan tingkat konsumsi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan produksi rokok akan

mempengaruhi peningkatan konsumsi rokok masyarakat.

Pemerintah sendiri telah banyak melakukan upaya intervensi guna menekan konsumsi rokok di Indonesia. Diantara peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang bahan yang mengandung zat adiktif seperti tembakau. Tentunya diharapkan peranan tersebut mampu mempengaruhi pola produksi tembakau yang mengandung zat adiktif. Pendapatan bea cukai di Indonesia dari produk rokok, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pendapatan Bea Cukai di Indonesia (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah		
	Jumlah	Naik/Turun	%
2014	88.212.345.613	31.774.888.937	36,02%
2015	119.987.234.550	11.347.438.901	9,46%
2016	131.334.673.451	29.888.308.946	22,76%
2017	161.222.982.397	28.016.025.826	17,38%
2018	189.239.008.223	11.980.296.759	6,33%
2019	201.219.304.982	31.774.888.937	36,02%

Sumber : BPS 2020

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat miskin namun konsumsi

rokok terus meningkat setiap tahunnya. Atas dasar tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Kemiskinan, Harga Rokok, Pendapatan Perkapita dan Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia Tahun 1990-2019”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Indonesia menempati peringkat pertama jumlah perokok terbanyak di ASEAN dengan jumlah perokok mencapai 65.188.338 orang
2. Perokok aktif di Indonesia sebagian besar berasal dari kalangan pendapatan rendah.
3. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi
4. Kenaikan pendapatan perkapita di Indonesia masih relatif rendah
5. Pemerintah membatasi iklan rokok dan memberikan tanda bahaya merokok

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahnya adalah besarnya jumlah perokok di Indonesia, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia ?
2. Apakah harga rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia ?

3. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia ?
4. Apakah cukai rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia?
5. Apakah kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok di Indonesia
2. Menganalisis pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh per kapita terhadap konsumsi rokok di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi, khususnya pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok di Indonesia
 - b. Menambah kepustakaan baik di tingkat jurusan,, fakultas maupun universitas
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian untuk pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kemiskinan dan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia
 - b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian dengan topik yang sama

LANDASAN TEORI

Kajian Teoritis

1. Konsumsi

Masyarakat mengasumsikan konsumsi hanya sebatas makan dan minum. Namun demikian, dalam ilmu ekonomi, konsumsi yaitu semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan (Mankiw, 2013: 221)

Menurut Sigit dan Sujana (2007: 67) kata konsumsi dalam kamus besar Ekonomi diartikan sebagai tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengurangi ataupun menghabiskan kegunaan (*utility*) suatu benda pada pemuasan terakhir dari kebutuhannya.

Menurut John Maynard Keynes (dalam Hendra, 2013:26), teori konsumsi dinamakan “*absolute income hypothesis*” teori konsumsi Keynes adalah teori yang paling sering dibicarakan dalam dunia akademik khususnya ilmu ekonomi. Teori konsumsi Keynes menyatakan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dari kedua variabel tersebut dapat digambarkan fungsi konsumsi sebagai berikut

$$C=a+bY_d$$

Keterangan:

C = konsumsi rumah tangga (agregat)

a = konsumsi otonom (besarnya konsumsi ketika pendapatan 0)

b = MPC

Y_d = pendapatan *disposable*

Berdasarkan fungsi konsumsi tersebut Keynes membuat dugaan atau asumsi mengenai teori konsumsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) yaitu jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Dari asumsi tersebut dijelaskan jika pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi dan tabungannya.
- 2) Rasio konsumsi terhadap pendapatan, atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume*) turun ketika pendapatan naik karena sebagian sisa dari pendapatan dialokasikan untuk *saving*.
- 3) Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peran penting.

Berdasarkan teori konsumsi dari Keynes maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat konsumsi seseorang sangat

dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat konsumsinya, begitupun sebaliknya. Oleh karena konsumsi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan karena pendapatan digunakan untuk konsumsi rokok. Selain itu faktor pendapatan dapat juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui faktor konsumsi (Anggraini, 2010: 81).

Rokok adalah salah satu produk olahan dari tembakau untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012). Rokok terbuat dari kertas berbentuk silinder dengan diameter 10mm dan panjang sekitar 70mm hingga 20mm yang berisi cacahan daun tembakau (info_datin, 2015: 6).

Levy (1984) dalam Amelia (2009:3) mendefinisikan merokok sebagai kegiatan seseorang membakar dan menghisap tembakau, yang juga menimbulkan asap yang dapat terhisap oleh

orang disekitarnya. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Armstrong (1990) dalam Putra (2013: 42) yang mengartikan merokok sebagai kegiatan menghisap asap tembakau yang dibakar kemudian dihembuskan lagi. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa merokok adalah kegiatan membakar daun tembakau untuk dihisap asapnya lalu dihembuskan kembali, yang mana hembusan asap tersebut dapat terhirup oleh orang disekitarnya dan dapat membahayakan kesehatan.

Secara umum perokok digolongkan menjadi dua macam, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu seseorang yang merokok dan menghisap langsung asap tembakau sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok. Sementara menurut Sitepoe (2000) dalam Putra (2013: 22) menggolongkan perokok berdasarkan jumlah konsumsinya, antara lain perokok ringan yaitu seseorang yang mengkonsumsi rokok kurang dari 10 batang perhari, perokok sedang yaitu seseorang yang mengkonsumsi rokok 11-23 batang perhari, dan perokok berat yaitu orang yang mengkonsumsi rokok lebih dari 24 batang perhari.

Pemerintah telah banyak menetapkan peraturan mengenai pengendalian konsumsi tembakau dan rokok guna untuk mengendalikan konsumsi rokok pada masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 81 tahun 1999

Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan sebagai perwujudan dari pasal 44 Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini berisi tentang kadar kandungan nikotin dan tar yang diperbolehkan, syarat produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, peran masyarakat dalam pengamanan rokok bagi kesehatan, dan penetapan kawasan bebas rokok dan ini harus dilakukan pengujian empiris untuk mengendalikannya.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 ini merupakan hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 yang berkaitan dengan iklan rokok. Iklan rokok dapat dilakukan di media elektronik, media

- cetak atau media luar ruangan dengan persyaratan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan larangan siaran iklan rokok yang menampilkan wujud rokok. Iklan di media elektronik hanya diperbolehkan tayang pada pukul 21.30 sampai 05.00 WIB.
 - 4) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 berisi tentang pengendalian tembakau. Hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain ukuran dan jenis peringatan kesehatan, batas waktu penayangan iklan rokok di media elektronik, serta pengujian kadar tar dan nikotin. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa tempat kesehatan tempat kerja, tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak serta angkutan umum merupakan kawasan bebas rokok
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 berisi tentang Kesehatan mengatur pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif. Pencantuan peringatan kesehatan diwajibkan bagi produsen rokok atau yang memasukkan rokok ke kawasan Indonesia. Pada pasal 115 menyatakan bahwa instansi pendidikan merupakan kawasan tanpa rokok.
 - 6) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
Peraturan ini memuat pedoman penetapan kawasan tanpa rokok dalam rangka memberikan perlindungan dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Penyediaan kawasan khusus merokok diperbolehkan dengan persyaratan terpisah dari tempat aktivitas, jauh dari tempat berlalu-lalang dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
 - 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini tentang Pengamanan

Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan berisi ketentuan produksi tembakau, penjualan, dan juga aturan iklan. Peraturan Pemerintah ini juga berisi tentang informasi tentang ketentuan kadar nikotin dan tar, bahaya rokok bagi kesehatan, dan juga larangan menjual dan memberikan rokok pada ibu hamil dan anak berusia dibawah 18 tahun.

8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013

Permenkes RI Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau wajib mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Industri rokok wajib mencantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan seluas 40% pada bagian dan belakang kemasan rokok. Informasi kadar nikotin dan tar, larangan konsumsi rokok pada perempuan hamil dan anak berusia dibawah 18 tahun, serta bahaya merokok bagi kesehatan juga wajib dicantumkan dalam kemasan rokok.

2. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam hidupnya misalnya sandang, pangan dan papan. Kemiskinan mempunyai definisi yang luas, seiring dengan semakin luasnya faktor penyebab, indikator dan permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya berkutat pada dimensi ekonomi saja, tetapi sudah meluas hingga dimensi sosial dan kesehatan. Selain kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, ketidakmampuan tersebut juga berdampak pada rendahnya standar hidup rata-rata, yakni seperti rendahnya standar kesehatan masyarakat dan rendahnya standar pendidikan.

Menurut *World Bank* (2000: 33) kemiskinan yaitu kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Sedangkan inti permasalahan dari kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Dalam teori ekonomi, kesejahteraan dapat diukur dari banyaknya barang yang dikonsumsi, semakin banyak barang yang dikonsumsi maka semakin tinggi kesejahteraan seseorang (Bhima, 2009: 61)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Deprtemen Sosial, kemiskinan

adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak dan memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan yaitu nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan nonmakanan yaitu pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan jasa lainnya.

Menurut Suryawati (2005: 72) kemiskinan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu: (1) kemiskinan absolut: bila pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan guna untuk hidup dan bekerja; (2) kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga menyebabkan ketimpangan pada masyarakat; (3) kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti sifat boros, malas, tidak kreatif dan tidak

mau membenahi tingkat kehidupan meskipun ada bantuan dan drongan dari pihak luar; (4) kemiskinan struktural: situasi kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya pada suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi (Sri Hastuti, 2009: 36) yaitu: 1) kemiskinan (*proper*): kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 2) ketidakberdayaan (*powerless*): rendahnya pendapatan akan mempengaruhi kekuatan sosial (*social power*) dari masyarakat terutama dalam memperoleh keadilan maupun kesamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*): seseorang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi tak terduga dimana situasi ini dalam penyelesaiannya membutuhkan alokasi pendapatan, 4) ketergantungan (*dependence*): seseorang yang disebut miskin yang mengalami keterbatasan pendapatan dan tidak mempunyai kekuatan sosial maka tingkat

ketergantungan terhadap pihak lain akan semakin tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan sumber pendapatan baru, sehingga bantuan dari pihak lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan akan sumber pendapatan, 5) keterasingan (*isolation*). Seseorang menjadi miskin karena disebabkan oleh faktor lokasi, dimana hal ini disebabkan oleh pembangunan fasilitas kesejahteraan yang tidak merata dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya persoalan tentang kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, namun juga perihal tentang tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, ketidakadilan dihadapan hukum, ancaman kriminalitas, dan ketidakberdayaan melawan kekuasaan sehingga tidak mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.

Menurut Yudistira dkk (2016: 554), kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak.

Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian, dan perumahan untuk kelangsungan hidupnya. Kemiskinan yang diukur dari kebutuhan dasar sebenarnya kurang relevan karena kebutuhan dasar tentunya masih banyak lagi sehingga seseorang layak dalam bermasyarakat. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut yaitu hidup dengan pendapatan di bawah USD\$1/hari dan kemiskinan menengah dengan pendapatan di bawah USD\$2/hari.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding dengan masyarakat disekitarnya (lingkungannya) semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga

kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) keluarga yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang layak bagi kemanusiaan mempunyai ciri-ciri atau kriteria sebagai berikut:

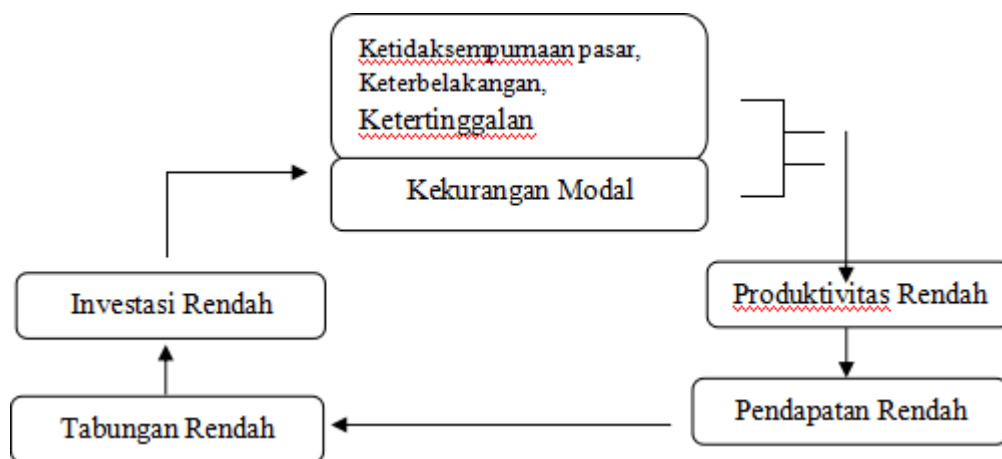
- a. Pembelanjaan rendah atau berada dibawah garis kemiskinan
- b. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah dan tidak memiliki keterampilan
- c. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, termasuk yang tidak memiliki MCK
- d. Pemilihan harta sangat terbatas jumlah dan nilainya
- e. Hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat
- f. Akses informasi (koran, radio, televisi dan internet) terbatas.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: (1) penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari sang miskin; (2) penyebab

keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga; (3) penyebab sub-budaya (subcultural) yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; (4) penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah atau orang lain; (5) penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial (Agnes, 2016: 33).

Menurut Sharp dkk (dalam Kuncoro 2010: 69) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam

modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953: 81) yang mengatakan “*a poor country is poor because it is poor*” atau dapat dikatakan Negara miskin itu miskin karena dia miskin.



Sumber: Kuncoro 2010:70

Gambar 5. Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, dan kekurangan modal mengakibatkan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan rendah. Jika pendapatan rendah maka berdampak pada tabungan dan investasi yang rendah, sehingga akan menyebabkan kekurangan modal (Gambar 5). Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2010: 69).

3. Harga

Kondisi ini dikarenakan pendapatan yang rendah karena mereka bekerja disektor non produktif dan konsumsi yang besar. Lingkaran setan kemiskinan menurut Nurks dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Harga merupakan suatu nilai yang dibuat untuk menjadikan patokan nilai suatu barang atau jasa. Harga sebagai patokan sebagai jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan juga merupakan cara bagi produsen untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Dengan kata lain harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat dari memiliki produk atau menggunakan jasa dari produsen barang atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual mealui tawar menawar, atau

ditetapkan langsung oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli.

Menurut Philip Kotler (2012: 132) harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Sedangkan Kotler dan Keller (2012: 410) menyatakan harga harus mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Dalam Kotler dan Armstrong (2013: 151) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa tersebut.

Pengertian dari penetapan harga menurut Alma (2011: 120) adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti dalam jangka waktu tertentu, sedangkan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2005: 142) menyatakan bahwa suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya lebih tinggi dari nilai yang diterima perusahaan tersebut akan kehilangan kemungkinan untuk memetik laba; jika harganya terlalu rendah dari nilai yang diterima, perusahaan tersebut tidak

akan berhasil menuai kemungkinan memperoleh laba.

Menurut Indriyo (2011: 226) penetapan harga merupakan harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan tiga pandangan pasar meliputi:

- 1) Biaya. Penetapan harga yang didasarkan atas dasar biaya adalah harga jual produk atas dasar biaya produksinya dan kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan. Besaran keuntungan dalam penetapannya tergantung pada kebijakan setiap perusahaan.
- 2) Konsumen. Penetapan harga yang ditetapkan atas dasar konsumen yaitu harga yang ditetapkan atas dasar selera konsumen. Apabila selera konsumen atau permintaan konsumen menghendaki rendah sebaiknya harga.
- 3) Persaingan. Penetapan harga atas dasar persaingan ditetapkan menurut kebutuhan persaingan yaitu berdasarkan persaingan dengan perusahaan lain yang sejenis yang merupakan pesaing-pesaingnya. Dalam situasi tertentu, perusahaan harus menetapkan harga jualnya jauh dibawah harga produksinya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan untuk memenangkan pesaing. Suatu

perusahaan berupaya agar harga berada pada tingkatan yang umum ditetapkan dalam bidan industrinya. Dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam penetapan harga, yaitu:

- a. Faktor Internal, faktor ini terdiri dari pertimbangan organisasi, sasaran pemasaran, biaya dan strategi bauran pemasaran.
- b. Faktor Eksternal, faktor ini terdiri dari situasi dan permintaan pasar, persaingan, harapan perantara dan faktor-faktor lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi, budaya dan politik.

4. Pendapatan Perkapita

Menurut Sukirno (2004: 33) pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu

dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Pada dasarnya pendapatan nasional merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya suatu pendapatan nasional mempengaruhi pendapatan perkapita suatu negara, namun jumlah penduduk suatu negara juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di suatu negara dikatakan maju secara merata apabila pendapatan perkapitanya besar. Meskipun pendapatan nasionalnya tinggi, namun jika tingginya pendapatan nasional itu diikuti oleh tingginya jumlah penduduk, maka bukan tidak mungkin negara tersebut hanya maju secara pendapatan namun miskin secara rumah tangga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu Negara (belajar.kemendiknas.go.id)

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Sukirno, 2008: 61)

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 1999: 44). Cerminan pembangunan ekonomi terletak pada kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dengan tingkat Pertumbuhan Domestik Bruto dan Produk Nasional Bruto. Keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Todaro (2001: 87) ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu:

- 1) Perkembangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic needs*)
- 2) Meningkatkan rasa harga diri self-esteem masyarakat sebagai manusia
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih freedom from servitude yang merupakan salah satu dari hak asasi.

5. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang

Cukai yang merupakan penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Pengertian cukai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut tentang barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sebagai berikut :

- 1) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) Peredarannya perlu diawasi;
- 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- 4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang-barang sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai barang kena cukai. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai. Jumlah cukai yang dihitung berdasarkan system *tariff advalorum* adalah sebesar perkalian antara presentase tarif cukai dikalikan dengan harga dasar. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual eceran (HJE). Hal yang perlu diketahui terkait dengan permohonan penetapan HJE adalah persyaratan kemasan eceran hasil tembakau dan ketentuan tentang isi/jumlah

batang/gram yang diperbolehkan dalam satu kemasan penjualan eceran hasil tembakau. Sesuai Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor Kep-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau. Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanent.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

Hasil Penelitian Terdahulu

Rizky Aryasa Pratama (2018), judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok Pada

Rumah Tangga Miskin (Studi : Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rokok yaitu harga rokok, pendapatan, konsumsi makanan, dan pendidikan pada rumah tangga miskin di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Penelitian menggunakan data cross section berjumlah 100 responden rumah tangga miskin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Squares (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga rokok dan konsumsi makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konsumsi rokok. Sebaliknya, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok. Di sisi lain pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap konsumsi rokok. Hasil tidak signifikan pada pendidikan disebabkan oleh rata-rata pendidikan kepala keluarga pada rumah tangga miskin relatif sama sehingga tidak berdampak pada pola konsumsi.

Likha Inayati (2018), judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok Tenaga Kerja Di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh usia, jenis kelamin, status perkawinan, gangguan

tidur, pendidikan, dan pendapatan terhadap konsumsi rokok tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari *Indonesian Life Survey 5* (IFLS 5) dengan 9.515 sampel terpilih yaitu tenaga kerja yang berstatus merokok. Pemilihan responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi robust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok tenaga kerja di Indonesia, sedangkan gangguan tidur, pendapatan, dan pendidikan berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja laki-laki cenderung mengkonsumsi rokok lebih tinggi dari pada perempuan. Tenaga kerja berstatus kawin memiliki konsumsi rokok lebih tinggi dari pada tenaga kerja berstatus belum/ tidak kawin

Haifa Sari, Sofyan Syahnur, Chenny Seftarita (2017) judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran konsumsi Rokok Pada Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin serta untuk mengetahui pola pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh tahun 2010 dan 2015. Variabel bebas yang digunakan adalah harga rokok, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga dewasa, pengeluaran makanan tanpa rokok, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data sekunder yaitu Susenas bulan maret tahun 2010 dan 2015. Hasil penelitian ini adalah variabel pendapatan rumah tangga dan pengeluaran makanan tanpa rokok mempengaruhi pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin di Aceh tahun 2010. Di tahun 2015 ada penambahan variabel, yaitu pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan yang berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rokok pada rumah tangga miskin. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat memasukkan variabel karakteristik variabel karakteristik psikologi pada rumah tangga miskin dengan penelitian yang bersifat mikro (*indept study*).

Hefrizal Handra dan Zamzami (2014), dengan judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Rumah Tangga Miskin di Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku rumah tangga miskin dalam mengelola pendapatannya untuk membeli rokok menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 menggunakan metode OLS sebagai alat analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran rokok dalam persentase pendapatan pada rumah tangga perokok di Provinsi Sumatera Barat sangat besar, jauh lebih besar daripada persentase pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran rokok rumah tangga dipengaruhi oleh faktor pendapatan, harga rokok, jumlah anggota rumah tangga pria dewasa, wilayah tempat tinggal, kategori umur kepala rumah tangga, dan pendidikan kepala rumah tangga.

J de Beyer, JC Lovelace, A Yürekli (2015), dengan judul penelitian “Kemiskinan dan tembakau” Di luar hubungan jangka pendek antara kemiskinan dan penggunaan tembakau, ada juga efek jangka panjang yang muncul karena risiko penyakit yang lebih tinggi yang dihadapi pengguna tembakau, dan kerentanan

keluarga miskin terhadap penyakit, terutama pencari nafkah. Di negara-negara berpenghasilan rendah, sangat sedikit orang yang dilindungi oleh asuransi kesehatan atau tunjangan pengangguran. Penyakit dan kematian, dan akibatnya hilangnya pendapatan pencari nafkah, dapat sangat menghancurkan bagi keluarga yang tinggal di dekat, atau di bawah, garis kemiskinan. Banyak orang miskin memiliki sedikit atau tanpa aset, terlepas dari kemampuan mereka untuk bekerja. Semakin miskin, kurang berpendidikan, dan kurang terampil, semakin besar kemungkinan mata pencaharian mereka adalah pekerjaan fisik. Ketika pencari nafkah dalam keluarga miskin menjadi terlalu sakit untuk bekerja, persediaan makanan dan pendapatan keluarga sering berhenti. Membayar untuk perawatan lebih lanjut memiskinkan keluarga - ketika orang yang hidup dengan \$ 1 sehari sakit, mereka mungkin harus memilih antara mencari perawatan, dan makanan untuk keluarga. Perawatan medis mungkin tidak dapat diakses, membutuhkan berjam-jam berjalan dan menunggu; kualitas perawatan sangat bervariasi, dan obat-obatan seringkali tidak tersedia. Episode-episode kesehatan yang buruk, biaya perawatan kesehatan, dan kematian dini sering dikutip oleh orang-orang miskin

sebagai keprihatinan paling buruk mereka, dan sebagai penyebab pencetus yang mendorong keluarga ke dalam kemiskinan. Sebagai bagian dari penelitian yang menggunakan metode partisipatif terbuka untuk berbicara dengan lebih dari 20.000 pria dan wanita miskin dari 23 negara, analisis isi dari 125 studi kasus menemukan bahwa penyakit atau cedera anggota keluarga merupakan pemicu paling sering terjadi geser ke bawah menuju kemiskinan (yang lebih buruk). Implikasi dari prevalensi tinggi penggunaan tembakau di kalangan pria dengan pendidikan rendah dan pendapatan rendah, yang meningkatkan risiko relatif mereka dari penyakit serius dan kematian dini, sangat serius. Kebijakan dan intervensi untuk membantu perokok miskin berhenti, dan untuk mencegah orang lain memulai, adalah bagian penting dari upaya nasional dan internasional untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan orang miskin.

William dan Wilkins (2006), dengan judul penelitian "Merokok dan kemiskinan". Masalah kemiskinan menyebabkan meningkatnya penggunaan obat-obatan baik legal maupun ilegal. Tembakau dan alkohol adalah obat-obatan legal yang menimbulkan kekhawatiran khusus. Kedua obat ini banyak disalahgunakan di Jerman oleh

orang-orang yang berusaha melarikan diri dari masalah sehari-hari mereka. Selama beberapa dekade telah diketahui bahwa penggunaan tembakau dan alkohol lebih banyak terjadi pada kelompok sosial ekonomi masyarakat yang lebih rendah (mereka yang memiliki prestasi pendidikan rendah, dibandingkan dengan orang yang memiliki kualifikasi pendidikan lebih lanjut atau lebih tinggi). Penggunaan tembakau dan alkohol sangat tinggi di kalangan para penganggur, baik sementara atau jangka panjang, serta orang-orang yang hidup sendirian. Anak-anak dan wanita lebih peduli tentang merokok daripada pria. Kesepian wanita, sering disertai dengan munculnya reaksi depresi atau depresi, meningkatkan kemungkinan merokok. Orang miskin menghabiskan hingga 20% dari pendapatan mereka untuk tembakau. Di banyak negara industri, usia mulai merokok menjadi lebih muda dan lebih muda, meningkatkan risiko pengembangan penyakit terkait tembakau yang dapat dihindari pada usia lebih dini. Ini berarti bahwa perokok muda yang mengembangkan penyakit kronis yang berhubungan dengan tembakau akan memerlukan perawatan medis selama bertahun-tahun, sehingga meningkatkan biaya perawatan penyakit yang

berhubungan dengan tembakau. Dalam beberapa tahun ke depan, program pencegahan yang efektif terhadap merokok harus dikembangkan, terutama untuk populasi sosial ekonomi yang lebih rendah, untuk menghentikan biaya sistem kesehatan yang meningkat selama beberapa dekade mendatang sehingga diperlukan kesadaran individu.

Jin E. Kim, PhD; Janice Y. Tsoh, PhD (2016), dengan judul penelitian “Merokok Rokok Di Antara Dewasa Muda yang Kurang Bermanfaat Secara Sosial-Ekonomi dalam Asosiasi Dengan Kerawanan Pangan dan Faktor-Faktor Lainnya”. Status sosial ekonomi rendah dikaitkan dengan tingginya tingkat merokok, dan perbedaan sosial ekonomi dalam merokok cenderung muncul selama masa dewasa muda. Untuk lebih memahami perbedaan sosial ekonomi dalam merokok di kalangan orang dewasa muda, kami memeriksa korelasi merokok dengan memperhatikan beberapa indikator sosial ekonomi yang belum diperiksa dalam populasi ini. Kami menganalisis data dari Survei Wawancara Kesehatan California 2011-2012. Sampel analitik terdiri dari orang dewasa muda yang berusia 18-30 tahun yang dianggap tidak beruntung secara sosial seperti diukur oleh pendidikan dan

kemiskinan. Analisis Regresi Logistik dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang Berhubungan dengan status merokok. Dalam kelompok ini, dan analisis regresi logistik multinomial dilakukan untuk menguji korelasi frekuensi merokok. Dalam sampel ini (N = 1.511; 48% perempuan, 66% Hispanik / Latino, 18% non-Hispanik kulit putih), 39,7% melaporkan mengalami ketidakamanan pangan dalam satu tahun terakhir. Prevalensi merokok secara signifikan lebih tinggi di antara orang dewasa muda yang dilaporkan menjadi rawan pangan (26,9%) dibandingkan di antara mereka yang melaporkan ketahanan pangan (16,4%). Kerawanan pangan tahun lalu secara signifikan dikaitkan dengan merokok saat ini, terlepas dari karakteristik sosiodemografi dan penggunaan alkohol. Secara khusus, kerawanan pangan secara signifikan dikaitkan dengan merokok setiap hari tetapi tidak setiap hari.

Definisi Konseptual

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Indonesia yang diterbitkan oleh BPS Nasional selama tahun 1990-2019. Variabel kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan satuan jumlah orang miskin.

2. Harga Rokok

Harga rokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga rata-rata yang diberlakukan dipasaran, untuk semua jenis merek rokok selama tahun 1990-2019, yang diterbitkan oleh BPS Nasional. Variabel harga rokok dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah.

3. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia selama tahun 1990-2019, yang diterbitkan oleh BPS Nasional. Variabel pendapatan per kapita dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah.

4. Cukai Rokok

Cukai rokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari penjualan rokok selama tahun 1990-2019, yang diterbitkan oleh BPS Nasional. Variabel cukai rokok dalam penelitian ini diukur dengan satuan rupiah.

5. Konsumsi Rokok

Konsumsi rokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah rokok yang terjual di Indonesia selama tahun 1990-2019, yang diterbitkan oleh BPS. Variabel konsumsi rokok dalam penelitian ini diukur dengan satuan slop atau box.

Definsi Operasional Variabel

1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Indikator kemiskinan dalam penelitian ini adalah jumlah orang yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan standar atau ukuran BPS periode 1990-2019 yang dinyatakan dalam satuan orang.

2. Harga Rokok

Harga merupakan suatu nilai yang dibuat untuk menjadikan patokan nilai suatu barang atau jasa. Harga sebagai patokan sebagai jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan juga merupakan cara bagi produsen untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Indikator harga rokok dalam penelitian ini adalah jumlah harga rata-rata rokok untuk semua produk rokok periode 1990-2019 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai

suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu yang biasanya dihitung dalam satu tahun. Indikator pendapatan per kapita dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan per kapita periode 1990-2019 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

4. Cukai Rokok

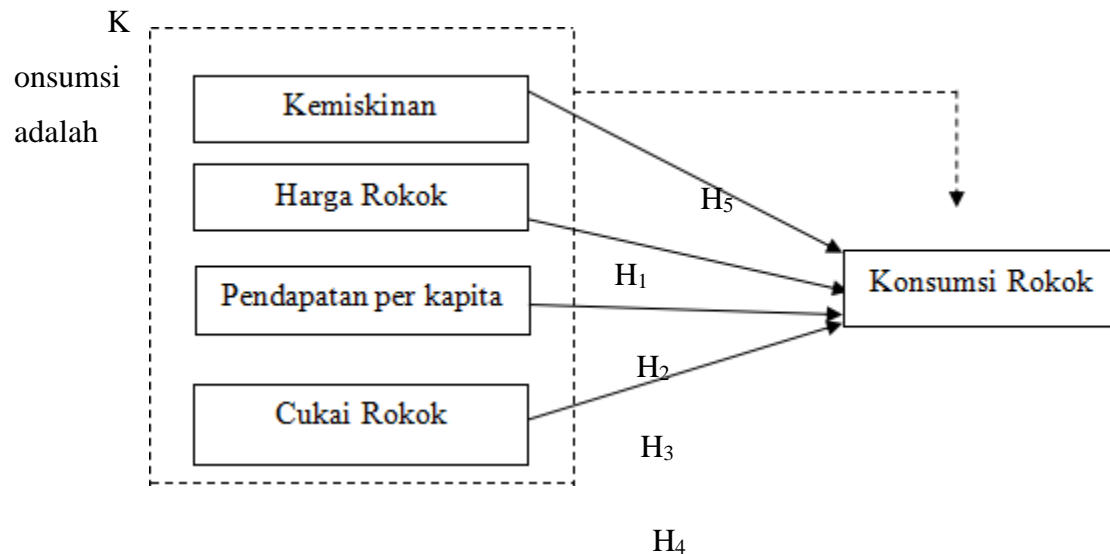
Cukai rokok atau cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Indikator cukai rokok dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan negara dari cukai rokok periode 2013 – 2018 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

5. Konsumsi Rokok

pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan, pakaian. Jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut, layanan kesehatan. Indikator konsumsi rokok dalam penelitian ini adalah jumlah konsumsi rokok per kapita periode 1990-2019 yang dinyatakan dalam satuan rupiah.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teoritis pengaruh pengaruh kemiskinan, harga rokok, pendapatan perkapita dan cukai rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia tahun 1990-2019, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6. Kerangka Pemikiran Teoritis

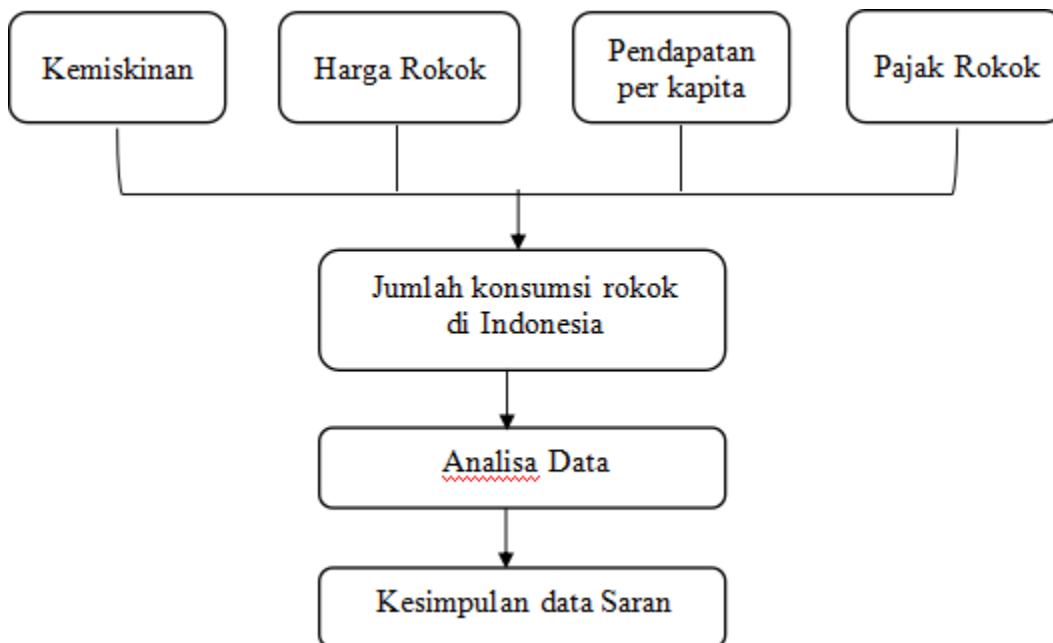
Keterangan :

- > Pengaruh secara individual
- > Pengaruh secara bersama-sama

Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berfikir penelitian merupakan gambaran secara skematis mengenai alur berfikir penelitian. Dengan adanya kerangka penelitian ini tentunya

akan memberikan kemudahan dalam memahami alur penelitian dan pemecahan masalah dalam penelitian. Kerangka berfikir penelitian, dapat dilihat pada gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Kerangka Berfikir Penelitian

Indikator pertama yang mempengaruhi jumlah konsumsi rokok yaitu kemiskinan. Apabila angka kemiskinan semakin tinggi, maka kecenderungan jumlah konsumsi rokok akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan pendapatan masyarakat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun demikian, apabila angka kemiskinan menurun, maka jumlah konsumsi rokok akan cenderung meningkat. Hal ini mempunyai makna bahwa adanya hubungan yang bertolak belakang antara angka kemiskinan dengan jumlah konsumsi rokok di Indonesia.

Indikator kedua yang mempengaruhi jumlah konsumsi rokok adalah harga rokok. Harga rokok yang semakin mahal, maka seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan rokok. Kondisi ini mempunyai kecenderungan bahwa semakin mahal harga rokok, maka seseorang akan menurunkan jumlah konsumsi rokok sehingga jumlah konsumsi rokok di Indonesia akan menurun. Sebaliknya apabila harga rokok menurun,

maka jumlah konsumsi rokok akan cenderung meningkat.

Indikator ketiga yang mempengaruhi jumlah konsumsi rokok adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita yang semakin meningkat, maka jumlah konsumsi rokok di Indonesia akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan per kapita menurun, maka jumlah konsumsi rokok akan cenderung menurun. Hal ini memberikan arti bahwa adanya hubungan yang searah antara pendapatan perkapita dengan jumlah konsumsi rokok.

Indikator keempat yang mempengaruhi jumlah konsumsi rokok adalah cukai rokok. Cukai rokok yang semakin mahal, maka seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan rokok. Kondisi ini mempunyai kecenderungan bahwa semakin tinggi cukai rokok, maka seseorang akan menurunkan jumlah konsumsi rokok sehingga jumlah konsumsi rokok di Indonesia akan menurun. Sebaliknya apabila cukai rokok menurun, maka jumlah konsumsi rokok akan cenderung meningkat.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2009:96). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H₁: Diduga variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok.
- H₂: Diduga variabel harga rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok.
- H₃: Diduga variabel pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok
- H₄: Diduga variabel cukai rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok.
- H₅: Diduga variabel kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja (Nazir, 2014: 70). Desain penelitian ini

diperlukan mulai dari awal hingga akhir penelitian sehingga diperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan metode kuantitatif. Metode deskriptif analisis merupakan penelitian dengan menggunakan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan fakta kemudian data disusun dan diolah sehingga menghasilkan analisis untuk memberikan interpretasi mengenai permasalahan yang diteliti. Metode kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2016: 2).

Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dapat merubah sehingga dapat membedakan atau mengubah suatu nilai (Kuncoro, 2013: 49). Menurut Sugiyono (2017: 2) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mendapatkan hasil dan informasi tentang data tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua variabel yang akan diteliti untuk mendapatkan kesimpulan. Penelitian menggunakan variabel bebas (variabel independent) dan variabel terikat (variabel dependent). Dalam penelitian ini menggunakan empat variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap jumlah konsumsi rokok di Indonesia.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya perubahan atau timbulnya variabel terkait. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah

- 1) Kemiskinan sebagai variabel bebas (X1).
- 2) Harga rokok sebagai variabel bebas (X2).
- 3) Pendapatan per kapita sebagai variabel bebas (X3).
- 4) Cukai rokok sebagai variabel bebas (X4)

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama

dalam sebuah penelitian atau variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah jumlah konsumsi rokok di Indonesia, dimana data konsumsi rokok ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat Nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan non random sampling dimana dilakukan dokumentasi dan dilakukan rekap pada data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Kuncoro, 2004: 23). Penelitian ini menggunakan sekunder yaitu data historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan, dengan sumber data ini Badan Pusat Statistik Nasional dari tahun 1990-2019.

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
 - 1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Setiap

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi distribusi variabel pengganggu atau residual, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan membuat hipotesis. Apabila p value (Asymp. Sig. (2-tailed)) > 0,05, distribusi data normal. Jika p value < 0,05, distribusi data tidak normal (Ghozali, 2011: 160).

Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal. Untuk menormalkan data harus terlebih dahulu tahu bentuk grafik histogram dari data yang ada apakah substansial dengan bentuk L dan sebagainya. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram dapat menentukan bentuk transformasinya (Ghozali, 2011: 163)

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011: 110). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih dari nol berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi

adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1

3) Uji Heteroskedesitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi variabel ketidaksamaan varian dari residul dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi *heteroskedesitas* (Ghozali, 2018: 137). Uji ini dilakukan dengan dengan uji *Glejser* untuk mengidentifikasi terjadi atau tidaknya *heteroskedesitas*. Uji ini melihat nilai *chi-squared*, bila nilai probabilitas lebih dari $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan uji ini bebas dari *heteroskedesitas*. Dan jika nilai *chi-squared* lebih kecil dari nilai probabilitas maka dapat dikatakan terjadi *heteroskedesitas* (Ghozali: 2018: 134).

4) Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinearitas* bertujuan untuk menguji bahwa dalam regresi terdapat korelasi antar variabel bebas

(variabel independen). Uji *multikolinearitas* dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari nilai *tolerance* yaitu 10, dapat dikatakan tidak terjadi *multikolinearitas*. Dan jika nilai VIF lebih besar dari nilai *tolerance* dapat dikatakan terjadi *multikolinearitas*. Jika variabel *independent* saling berkorelasi, maka variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel *independent* sama dengan nol (Ghozali, 2018: 17).

Teknik Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* dengan variabel *dependent* (Ghozali, 2016: 134) Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap jumlah konsumsi rokok. Persamaannya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Menurut Gujarati dalam (Eriyanto, 2017: 45) ada perbedaan satuan dan besaran variabel menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma untuk mengurangi adanya gejala *heteroskedastisitas* dan mengetahui

kepekaan antar variabel. Transformasi logaritma mengurangi *heteroskedastisitas*. Hal ini disebabkan karena transformasi yang memaparkan skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan antara kedua nilai dari sepuluh kali lipat menjadi perbedaan dua kali lipat.

Dalam penelitian ini menggunakan model *Double-Log*, dalam model *Double-Logaritma* terdapat dua variabel (Y dan X) yang ditransformasikan secara Logaritma Natural (Ln). Model *Double-Logaritma Natural* diterapkan dalam penelitian ini, artinya bahwa yang ditransformasikan kedalam bentuk logaritma natural yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Bentuk model persamaannya yaitu :

$$\text{Ln}Y = a + \text{Ln}b_1X_1 + \text{Ln}b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 e$$

Keterangan :

$\text{Ln}Y$ = Jumlah konsumsi rokok

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi (X_1)

b_2 = Koefisien regresi (X_2)

b_3 = Koefisien regresi (X_3)

b_4 = Koefisien regresi (X_4)

$\text{Ln}X_1$ = Kemiskinan

$\text{Ln}X_2$ = Harga rokok

$\text{Ln}X_3$ = Pendapatan per kapita

$\text{Ln}X_4$ = Cukai rokok

e = Error

Uji Statistik

Uji statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok terhadap konsumsi rokok. Uji ini terdiri dari uji koefisien regresi parsial (Uji t), pengujian koefisien parsial secara bersama-sama (Uji F), dan pengujian koefisien determinasi (R^2). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

1. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Menurut (Ghozali, 2018: 98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Adapun langkah-langkah uji t adalah:

Hipotesis dilakukan sebagai berikut:

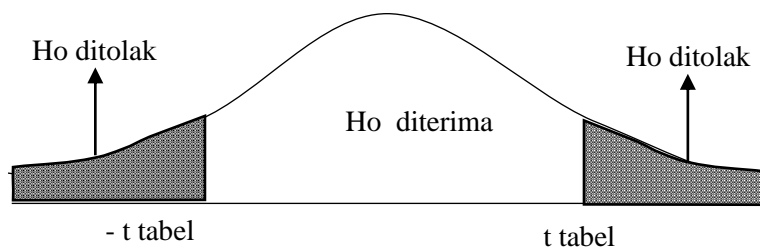
$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya suatu variabel independen bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Statistik t dihitung dari formula sebagai berikut :

$$\text{Uji } t : t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

Dimana :



Gambar 8. Kurva Normal Uji t

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali, 2018: 98) Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan semuanya mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam menghitung F_{hitung} digunakan rumus sebagai berikut :

$$F_{hitung} : F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan

R^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah Data

k = Jumlah variabel

β_1 = koefisien parameter

se (β_1) = standar error koefisien parameter

Cara uji t yaitu membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), α adalah tingkat signifikansi dan (n-k) derajat kebebasan yaitu jumlah n observasi dikurangi jumlah variabel independen dalam model (Ghozali, 2013: 95)

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

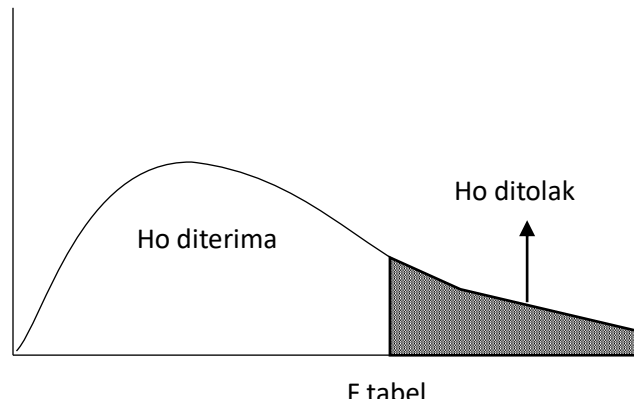
$H_0: \beta_1: \beta_2: \beta_3: \beta_4 = 0$ diduga tidak ada pengaruh signifikansi antara variabel kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok secara bersama-sama terhadap variabel jumlah konsumsi rokok.

$H_a: \beta_1: \beta_2: \beta_3: \beta_4 \neq 0$ diduga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok secara bersama-sama variabel jumlah konsumsi rokok

Kesimpulan menolak atau menerima H_0 :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak



Gambar 9. Uji F

3. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi model terkait. Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\overline{R^2} = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k}$$

Dimana :

$$R^2 = \frac{JK \text{ Regresi}}{JK \text{ Total}}$$

Keterangan

n = Jumlah Responden

k = Jumlah Variabel Bebas

JK regresi = Jumlah Kuadrat Regresi

JK total = Jumlah Kuadrat Total

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai *Adjusted* R^2

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2018: 97).

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kebijakan Pengendalian Masalah Rokok

Merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan tubuh, dimana banyak penyakit yang sering dihubungkan dengan kebiasaan merokok. Merokok bisa meningkatkan resiko untuk terkena suatu

penyakit paru-paru sehingga terjadi gejala sesak nafas. Mengingat tingginya prevalensi perokok, maka perlu diterbitkan regulasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya rokok bagi kesehatan.

Saat ini regulasi tentang penggunaan tembakau atau secara lebih spesifik pengendalian masalah merokok di Indonesia, tersedia dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Selain itu ada pula instruksi oleh pihak eksekutif, baik berupa Instruksi Menteri/Kepala Badan atau Peraturan Gubernur. Regulasi utama yang secara khusus mengatur pengendalian masalah merokok adalah suatu Peraturan Pemerintah (PP) yang disebut PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyakit akibat rokok bagi individu maupun masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara a) melindungi kesehatan masyarakat terhadap terjadinya penyakit akibat penggunaan rokok; b) melindungi penduduk dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan; dan c) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat merokok terhadap kesehatannya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan berbagai aturan seperti a) kandungan kadar nikotin dan tar; b) persyaratan produksi

dan penjualan rokok; c) persyaratan iklan dan promosi rokok; dan d) penetapan kawasan tanpa rokok.

Produsen diwajibkan melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar di laboratorium yang terakreditasi, mencantumkan informasi tersebut di setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Selain itu, produsen juga diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan. Keputusan Menteri ditetapkan bahwa setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian dan dilarang menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dalam peraturan ini juga diatur kewajiban berbagai pihak, misalnya Menteri Pertanian berkewajiban menggerakkan, mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tanaman tembakau yang berisiko kesehatan minimal. Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian wajib mendorong dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produk rokok dengan risiko kesehatan minimal. PP ini juga menetapkan bahwa iklan dan promosi dapat dilakukan di media elektronik pada periode jam 21.30 sampai

dengan 05.00 waktu setempat. Iklan yang dilarang antara lain yang menyarankan orang untuk merokok atau memperagakan gambar atau tulisan. Setiap iklan pada media elektronik, media cetak, dan media luar ruang harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan. Promosi dengan pemberian cuma-cuma atau pemberian hadiah berupa rokok juga dilarang.

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Penduduk dikatakan miskin apabila 1) tidak memiliki

faktor produksi sendiri, dimana seseorang hanya bekerja sebagai buruh dengan upah yang relatif rendah. 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri dikarenakan orang tersebut tidak mempunyai sejumlah dana yang memadai 3) tingkat pendidikan yang rendah sehingga hanya bekerja sebagai pekerja kasar dengan upah yang rendah 4) tidak mempunyai fasilitas untuk kegiatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan keluarga dan 5) tidak mempunyai keterampilan yang memadai. Kondisi-kondisi tersebut menjadi faktor utama yang menjadi penghambat seseorang untuk memperoleh pendapatan yang layak. Karakteristik pribadi yang relatif sulit untuk melakukan perubahan karena faktor keterbatasan, menyebabkan sulit bagi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya.

Angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, mengalami fluktuasi, dimana angka kemiskinan selama tahun 1990-2019 dapat dilihat Tabel 4. sebagai berikut :

Tabel 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 1990 – 2019

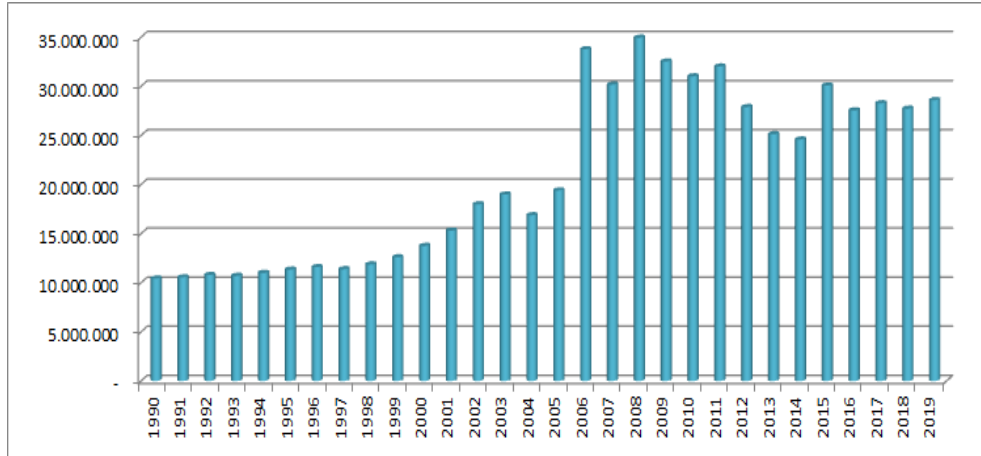
Tahun	Jumlah (orang)	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1990	10.431.010	-	-
1991	10.556.182	125.172	1,20%
1992	10.788.418	232.236	2,20%

Tahun	Jumlah (orang)	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1993	10.702.111	- 86.307	-0,80%
1994	11.001.770	299.659	2,80%
1995	11.342.825	341.055	3,10%
1996	11.592.367	249.542	2,20%
1997	11.383.704	- 208.663	-1,80%
1998	11.861.820	478.116	4,20%
1999	12.597.253	735.433	6,20%
2000	13.756.200	1.158.947	9,20%
2001	15.296.894	1.540.694	11,20%
2002	17.984.500	2.687.606	17,57%
2003	18.984.000	999.500	5,56%
2004	16.879.400	- 2.104.600	-11,09%
2005	19.404.050	2.524.650	14,96%
2006	33.775.000	14.370.950	74,06%
2007	30.170.000	- 3.605.000	-10,67%
2008	34.960.000	4.790.000	15,88%
2009	32.530.000	- 2.430.000	-6,95%
2010	31.020.000	- 1.510.000	-4,64%
2011	32.020.000	1.000.000	3,22%
2012	27.890.000	- 4.130.000	-12,90%
2013	25.130.000	- 2.760.000	-9,90%
2014	24.590.000	- 540.000	-2,15%
2015	30.070.000	5.480.000	22,29%
2016	27.550.000	- 2.520.000	-8,38%
2017	28.280.000	730.000	2,65%
2018	27.730.000	- 550.000	-1,94%
2019	28.590.000	860.000	3,10%

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa jumlah orang yang termasuk dalam kategori miskin selama 30 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rata-rata jumlah penduduk miskin sebanyak 20.962.250 jiwa atau orang. Jumlah terbesar

penduduk miskin terjadi pada tahun 2008, dimana terdapat 34.960.000 penduduk. Fluktuasi kemiskinan selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Tabel 4.

Gambar 10. Angka Kemiskinan Tahun 1990-2019

3. Harga Rokok

Harga sebagai patokan sebagai jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen, dan juga merupakan cara bagi produsen untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Harga juga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan dengan manfaat dari memiliki produk atau menggunakan jasa dari produsen barang atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan langsung oleh penjual untuk satu harga yang sama

terhadap semua pembeli. Secara umum, ketika harga produk mahal, maka barang yang ditawarkan semakin banyak, akan tetapi barang yang diminta akan semakin sedikit.

Harga rokok yang ada dipasar, secara umum ditentukan oleh produsen dan merupakan harga yang tetap. Hal ini dikarenakan dalam membeli rokok tidak tawar menawar karena harga sudah tertera dalam bandrol. Rata-rata harga rokok di Indonesia selama tahun 1990-2019, sebagai berikut:

Tabel 5. Rata-rata Harga Rokok di Indonesia tahun 1990 – 2019

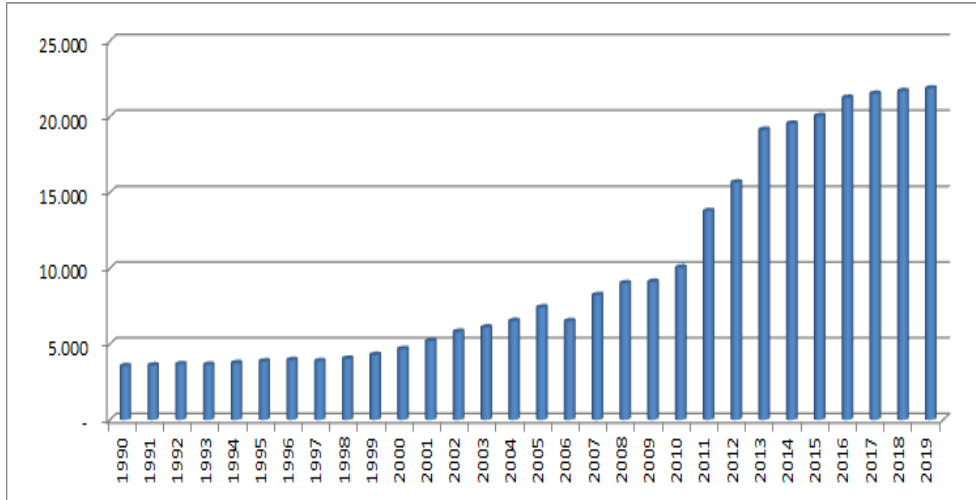
Tahun	Rupiah	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1990	3.539	-	-
1991	3.582	42	1,20%
1992	3.660	79	2,20%
1993	3.631	- 29	-0,80%
1994	3.733	102	2,80%
1995	3.849	116	3,10%

Tahun	Rupiah	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1996	3.933	85	2,20%
1997	3.862	- 71	-1,80%
1998	4.025	162	4,20%
1999	4.274	250	6,20%
2000	4.667	393	9,20%
2001	5.190	523	11,20%
2002	5.802	612	11,79%
2003	6.090	288	4,96%
2004	6.516	426	7,00%
2005	7.413	897	13,77%
2006	6.502	- 911	-12,29%
2007	8.223	1.721	26,47%
2008	9.005	782	9,51%
2009	9.100	95	1,05%
2010	10.043	943	10,36%
2011	13.765	3.722	37,06%
2012	15.654	1.889	13,72%
2013	19.130	3.476	22,21%
2014	19.533	403	2,11%
2015	20.045	512	2,62%
2016	21.245	1.200	5,99%
2017	21.516	271	1,28%
2018	21.687	171	0,79%
2019	21.864	177	0,82%

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa rata-rata harga rokok di Indonesia selama 30 tahun cenderung mengalami kenaikan secara terus menerus. Rata-rata harga rokok sebesar Rp. 9.703 setiap bungkusnya dari berbagai isi atau kemasan. Kenaikan harga rokok terbesar

terjadi pada tahun 2011, dimana pada tahun ini harga rokok mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.722 per bungkusnya. Perkembangan rata-rata harga rokok selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 10 sebagai berikut:



Sumber : Tabel 5

Gambar 11. Rata-rata Harga Rokok di Indonesia 1990-2019

4. Pendapatan per Kapita di Indonesia

Pada dasarnya pendapatan nasional merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya suatu pendapatan nasional mempengaruhi pendapatan perkapita suatu negara, namun jumlah penduduk suatu negara juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di suatu negara dikatakan maju secara merata

apabila pendapatan perkapitanya besar. Meskipun pendapatan nasionalnya tinggi, namun jika tingginya pendapatan nasional itu diikuti oleh tingginya jumlah penduduk, maka bukan tidak mungkin negara tersebut hanya maju secara pendapatan namun miskin secara rumah tangga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu Negara. Pendapatan per kapita di Indonesia di Indonesia selama tahun 1990-2019 sebagai berikut :

Tabel 6. Pendapatan per Kapita di Indonesia tahun 1990 – 2019 (dalam satuan rupiah)

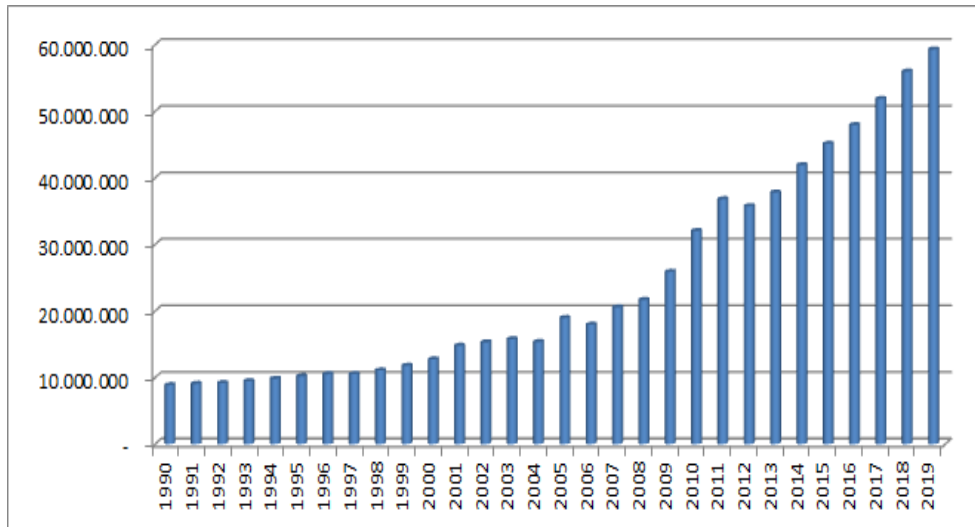
Tahun	Jumlah	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1990	8.871.579	-	-
1991	9.066.754	195.175	2,20%
1992	9.175.555	108.801	1,20%
1993	9.478.348	302.793	3,30%
1994	9.819.569	341.221	3,60%
1995	10.182.893	363.324	3,70%
1996	10.518.928	336.035	3,30%

Tahun	Jumlah	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1997	10.529.447	510.519	3,10%
1998	11.076.979	547.531	5,20%
1999	11.763.751	686.773	6,20%
2000	12.728.379	964.628	8,20%
2001	14.190.376	761.997	16,20%
2002	15.295.826	505.450	3,42%
2003	15.774.281	478.455	3,13%
2004	15.939.217	435.064	2,76%
2005	16.950.893	.611.676	23,55%
2006	17.951.357	999.537	5,27%
2007	20.552.426	2.601.070	14,49%
2008	21.666.776	1.114.350	5,42%
2009	25.880.866	4.214.090	19,45%
2010	32.028.697	6.147.830	23,75%
2011	36.795.098	4.766.402	14,88%
2012	35.748.259	1.046.839	2,85%
2013	37.798.050	2.049.791	5,73%
2014	41.915.863	4.117.813	10,89%
2015	45.119.612	3.203.749	7,64%
2016	47.937.723	2.818.110	6,25%
2017	51.881.200	3.943.477	8,23%
2018	55.986.859	4.105.660	7,91%
2019	59.290.120	3.303.261	5,90%

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa pendapatan per kapita di Indonesia selama 30 tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus. Kondisi ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tentunya pendapatan perkapita akan selalu meningkat apabila tidak terjadi krisis ekonomi yang parah. Selain itu juga pertumbuhan penduduk juga tidak mengalami

pertumbuhan yang sangat drastis. Kenaikan terbesar pendapatan per kapita di Indonesia terjadi pada tahun 2010, dimana pada tahun ini terjadi kenaikan pendapatan per kapita sebesar Rp. 6.147.830. Rata-rata kenaikan pendapatan per kapita selama tahun 1990-2019 sebesar Rp. 2.444.127. Perubahan pendapatan per kapita selama kurun waktu 18 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 11 berikut:



Sumber : Tabel 6

Gambar 12. Pendapatan per kapita di Indonesia Tahun 1990-2019

5. Cukai Rokok di Indonesia

Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan pemerintah. Jumlah cukai yang dihitung berdasarkan system *tariff advalorum* adalah sebesar

perkalian antara presentase tarif cukai dikalikan dengan harga dasar. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual eceran. Cukai rokok yang diterima pemerintah selama tahun 1990-2019 sebagai berikut:

Tabel 7. Cukai Rokok tahun 1990– 2019

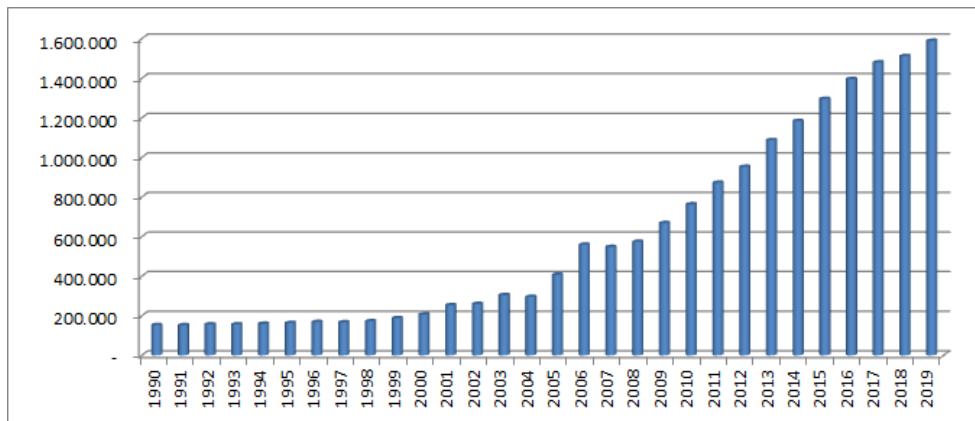
Tahun	Jumlah (Rupiah)	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1990	15.319.616.313.250	-	-
1991	15.201.655.267.638	- 117.961.045.612	-0,77%
1992	15.645.543.601.453	443.888.333.815	2,92%
1993	15.643.979.047.093	- 1.564.554.360	-0,01%
1994	15.939.650.251.083	295.671.203.990	1,89%
1995	16.338.141.507.360	398.491.256.277	2,50%
1996	16.844.623.894.088	506.482.386.728	3,10%
1997	16.696.391.203.820	- 148.232.690.268	-0,88%
1998	17.234.015.000.583	537.623.796.763	3,22%
1999	18.802.310.365.636	1.568.295.365.053	9,10%
2000	20.550.925.229.641	1.748.614.864.004	9,30%
2001	25.302.299.142.734	4.751.373.913.093	23,12%

Tahun	Jumlah (Rupiah)	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
2002	25.974.256.211.004	671.957.068.270	2,66%
2003	30.459.827.572.578	4.485.571.361.574	17,27%
2004	29.562.665.626.936	- 897.161.945.642	-2,95%
2005	40.812.968.666.408	11.250.303.039.472	38,06%
2006	55.910.489.442.660	15.097.520.776.252	36,99%
2007	54.783.200.363.800	- 1.127.289.078.860	-2,02%
2008	57.371.529.914.400	2.588.329.550.600	4,72%
2009	66.851.280.051.800	9.479.750.137.400	16,52%
2010	76.320.312.345.200	9.469.032.293.400	14,16%
2011	87.189.602.722.000	10.869.290.376.800	14,24%
2012	95.249.524.068.380	8.059.921.346.380	9,24%
2013	108.704.931.754.400	13.455.407.686.020	14,13%
2014	118.360.899.003.100	9.655.967.248.700	8,88%
2015	129.566.954.285.500	11.206.055.282.400	9,47%
2016	139.649.800.560.800	10.082.846.275.300	7,78%
2017	147.985.549.560.000	8.335.748.999.200	5,97%
2018	151.156.986.433.000	3.171.436.873.000	2,14%
2019	158.911.564.598.600	7.754.578.165.600	5,13%

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat dikemukakan bahwa pendapatan pemerintah dari cukai rokok selama 30 tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan terbesar pendapatan cukai rokok di Indonesia terjadi

pada tahun 2006, dimana pada tahun ini terjadi kenaikan pendapatan cukai rokok sebesar Rp. 15.097.520.776.252. Perubahan pendapatan cukai rokok selama kurun waktu 30 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 12 berikut:



Sumber : Tabel 7

Gambar 13. Cukai Rokok di Indonesia Tahun 1990-2019

6. Konsumsi Rokok di Indonesia

Masyarakat mengasumsikan bahwa konsumsi hanya sebatas makan dan minum, merupakan asumsi yang tidak sesuai dengan realitas yang terjadi dimasyarakat. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi yaitu semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan hidup dan untuk mencapai kepuasan, demikian juga halnya dengan

konsumsi rokok. Secara umum perokok digolongkan menjadi dua macam, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif yaitu seseorang yang merokok dan menghisap langsung asap tembakau sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang secara tidak langsung menghirup asap rokok. Perkembangan jumlah konsumsi rokok di Indonesia selama tahun 1990-2019, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Konsumsi Rokok tahun 2002 – 2019 (dalam satuan rupiah)

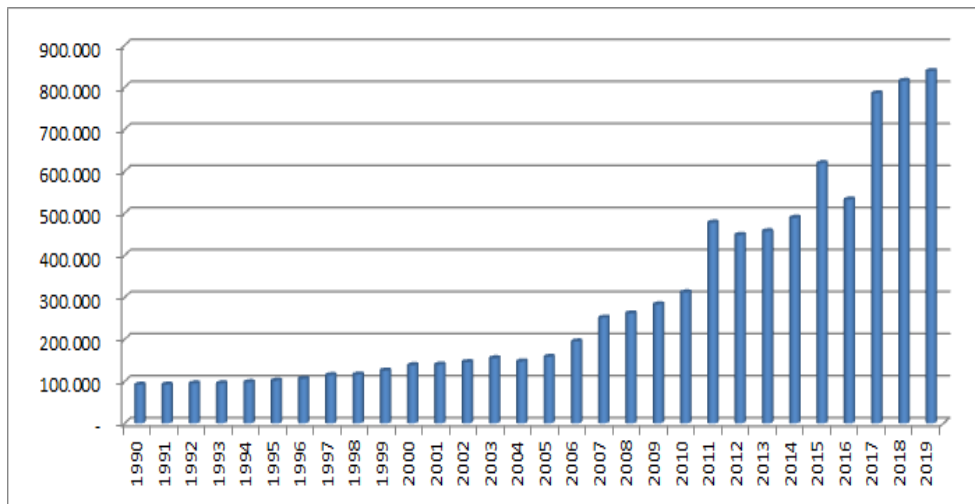
Tahun	Jumlah (Rupiah)	Kenaikan/Penurunan	
		Jumlah	%
1990	91.846	-	-
1991	92.222	377	0,41%
1992	95.091	2.868	3,11%
1993	95.300	209	0,22%
1994	97.968	2.668	2,80%
1995	101.857	3.889	3,97%
1996	106.054	4.197	4,12%
1997	114.666	8.612	8,12%
1998	116.156	1.491	1,30%
1999	125.472	9.316	8,02%
2000	138.408	12.936	10,31%
2001	140.097	1.689	1,22%
2001	145.787	5.690	4,06%
2003	155.002	9.215	6,32%
2004	147.359	- 7.643	-4,93%
2005	158.363	11.005	7,47%
2006	194.915	36.552	23,08%
2007	251.357	56.442	28,96%
2008	261.736	10.379	4,13%
2009	283.382	21.646	8,27%

2010	311.784	28.402	10,02%
2011	477.764	165.980	53,24%
2012	448.456	- 29.308	-6,13%
2013	457.160	8.704	1,94%
2014	489.224	32.064	7,01%
2015	619.296	130.072	26,59%
2016	532.660	- 86.636	-13,99%
2017	785.540	252.880	47,47%
2018	815.134	29.594	3,77%
2019	838.477	23.343	2,86%

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan Tabel 8 tersebut dapat dikemukakan bahwa konsumsi rokok selama 30 tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan terbesar pendapatan konsumsi rokok di Indonesia terjadi pada tahun 2017, dimana

pada tahun ini terjadi kenaikan konsumsi rokok sebesar Rp.252.880. Perubahan konsumsi cukai rokok selama kurun waktu 18 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 13 berikut:



Sumber : Tabel 8

Gambar 14. Konsumsi Rokok di Indonesia Tahun 2002-2019

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi

normalnya sebuah persamaan atau model regresi. Uji normalitas data untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu memiliki distribusi normal atau tidak

dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*.

Tabel 9. Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
Uraian		
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,11086159
Most Extreme Differences	Absolute	0,228
	Positive	0,078
	Negative	-0,228
Kolmogorov-Smirnov Z		1,250
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,088

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan Tabel 9 dapat dikemukakan bahwa besarnya nilai *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 1,250 dengan signifikansi 0,088. Hasil ini memberikan makna bahwa dengan alpha lebih dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah situasi adanya multikorelasi diantara variabel satu

Tabel 10. Uji Multikolinearitas

Atribut	Tolerance	VIF	Keterangan
Kemiskinan	0,182	5,491	Tdk terjadi multikol
Harga Rokok	0,126	7,924	Tdk terjadi multikol
Pendapatan per kapita	0,119	8,392	Tdk terjadi multikol
Cukai Rokok	0,104	9,653	Tdk terjadi multikol

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 dapat dikemukakan bahwa tidak ada variabel bebas yang mempunyai korelasi lebih dari 10,0 yang berarti tidak ada korelasi antar

dengan variabel lainnya atau dengan kata lain diantara variabel-variabel tersebut dapat dibentuk hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Jika nilai VIF lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

variabel *independen* lainnya yang nilainya lebih dari 90%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas atau gangguan antara variabel *independent*.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas. Hasil analisis uji heteroskedastisitas, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,552	0,809		0,683	0,501
kemiskinan	-0,010	0,072	-0,063	-0,145	0,886
harga_rokok	0,068	0,069	0,514	0,990	0,332
PDRB	0,076	0,060	0,674	1,262	0,219
cukai_rokok	-0,069	0,043	-0,934	-1,630	0,116

a. Dependent Variable: Abs_Ut

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 11 hasil uji heteroskedastisitas Glesjer diperoleh nilai signifikansi semuanya lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *independen* tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel *independen* atau bebas, sehingga tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas.

Autokorelasi berarti bahwa adanya korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan satuan waktu. Untuk mendianogsa adanya tidaknya Autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan dengan pengujian terhadap Uji *Durbin Watson* (Uji DW), dengan ketentuan sebagai berikut :

4. Uji Autokorelasi

Tabel 12. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,989 ^a	0,979	0,975	0,11940	1,293

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,293. Dengan sampel 18 dan $k=4$, didapatkan $dl=1,1426$ dan $du= 1,7386$. Hasil ini memberikan makna bahwa nilai Durbin Watson berada pada area $1,1426 - 1,7386$ sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (Tabel 4.9), diperoleh nilai *Adjusted R Squared* sebesar 0,975 keempat

variabel yaitu kemiskinan (X_1), harga rokok (X_2), pendapatan per kapita (X_3) dan cukai rokok (X_4) memberikan kontribusi sebesar sebesar 97,50% terhadap konsumsi rokok sedangkan sisanya 2,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar yang diteliti atau selain variabel kemiskinan, harga rokok, pendapatan per kapita dan cukai rokok. Variabel lain yang dapat mempengaruhi konsumsi rokok antara lain usia, kesehatan maupun perilaku masyarakat.

2. Uji Signifikansi t

Hasil analisis uji signifikansi t dapat dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13. Uji Signifikansi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3,033	1,225		-2,477	0,020
kemiskinan	-0,230	0,108	-0,145	-2,119	0,044
harga_rokok	-0,759	0,104	-0,596	-7,273	0,000
PDRB	0,046	0,091	-0,043	-0,509	0,615
cukai_rokok	-0,420	0,064	-0,590	=6,523	0,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

1) Pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok

Untuk menguji kebenaran akan pengaruh variabel kemiskinan terhadap konsumsi rokok, digunakan uji hipotesa sebagai berikut :

a. Uji Statistik

$H_0: b_1 = 0$, tidak ada pengaruh yang bermakna dari variabel kemiskinan terhadap variabel konsumsi rokok.

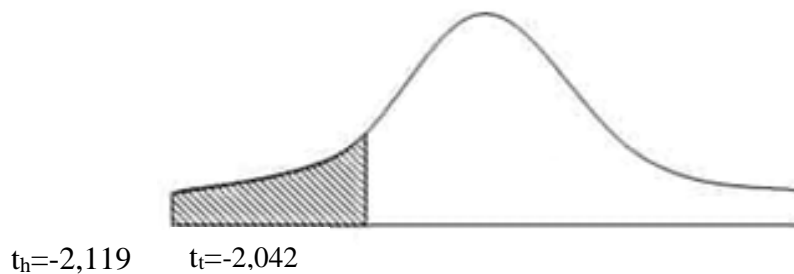
$H_a: b_1 > 0$, ada pengaruh yang bermakna dari variabel kemiskinan terhadap variabel konsumsi rokok.

b. Kriteria Pengujian:

- 1) Level of significance 0,05
- 2) Derajat kebebasan df : $n - (k + 1)$
- 3) Uji satu sisi

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok dengan program SPSS (Tabel 4.10) diketahui bahwa $t_{hitung} = -2,119 > t_{tabel} =$

2,042, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) diterima, hal ini berarti bahwa kemiskinan berpengaruh negatif yang terhadap konsumsi rokok. Variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 15. Pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok

2) Pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok

- 2) Derajat kebebasan df : $n - (k + 1)$
- 3) Uji satu sisi

Untuk menguji kebenaran akan pengaruh variabel harga rokok terhadap konsumsi rokok, digunakan uji hipotesa sebagai berikut :

a. Uji Statistik

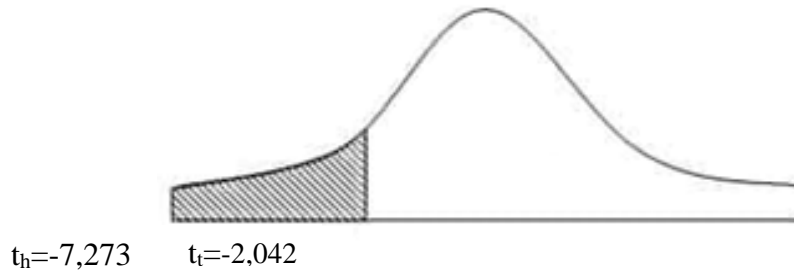
$H_0: b_1 = 0$, tidak ada pengaruh yang bermakna dari variabel harga rokok terhadap variabel konsumsi rokok.

$H_a: b_1 > 0$, ada pengaruh yang bermakna dari variabel harga rokok terhadap variabel konsumsi rokok.

b. Kriteria Pengujian:

- 1) Level of significance 0,05

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok dengan program SPSS (Tabel 4.10) diketahui bahwa $t_{hitung} = -7,273 > t_{tabel} = -2,042$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) diterima, hal ini berarti bahwa harga rokok berpengaruh negatif yang terhadap konsumsi rokok. Variabel harga rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok dapat dilihat pada grafik sebagai berikut::



Gambar 16. Pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok

3) Pengaruh pendapatan per kapita terhadap konsumsi rokok

Untuk menguji kebenaran akan pengaruh variabel pendapatan per kapita terhadap konsumsi rokok, digunakan uji hipotesa sebagai berikut :

a. Uji Statistik

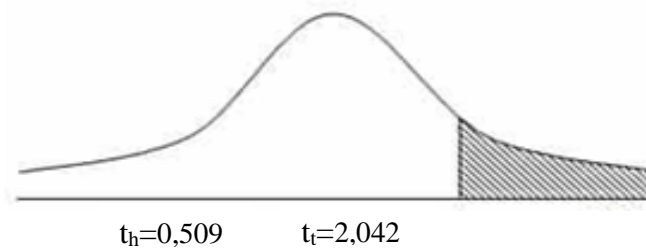
$H_0: b_1 = 0$, tidak ada pengaruh yang bermakna dari variabel pendapatan per kapita terhadap variabel konsumsi rokok.

$H_a: b_1 > 0$, ada pengaruh yang bermakna dari variabel pendapatan per kapita terhadap variabel konsumsi rokok.

b. Kriteria Pengujian:

- 1) Level of significance 0,05
- 2) Derajat kebebasan $df : n - (k + 1)$
- 3) Uji satu sisi

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh pendapatan per kapita terhadap konsumsi rokok dengan program SPSS (Tabel 4.10) diketahui bahwa $t_{hitung} = 0,509 < t_{tabel} = 2,042$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) ditolak, hal ini berarti bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 17. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap konsumsi rokok

4) Pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok

Untuk menguji kebenaran akan pengaruh variabel cukai rokok terhadap

konsumsi rokok, digunakan uji hipotesa sebagai berikut :

a. Uji Statistik

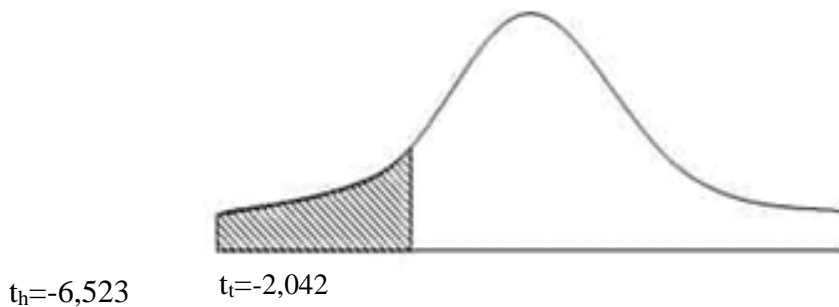
$H_0: b_1 = 0$, tidak ada pengaruh yang bermakna dari variabel cukai rokok terhadap variabel konsumsi rokok.

$H_a: b_1 > 0$, ada pengaruh yang bermakna dari variabel cukai rokok terhadap variabel konsumsi rokok.

b. Kriteria Pengujian:

- 1) Level of significance 0,05
- 2) Derajat kebebasan $df : n - (k + 1)$
- 3) Uji satu sisi

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok dengan program SPSS (Tabel 4.10) diketahui bahwa $t_{hitung} = -6,523 > t_{tabel} = -2,042$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, sedangkan hipotesa alternatif (H_a) diterima, hal ini berarti bahwa cukai rokok berpengaruh negatif yang terhadap konsumsi rokok. Variabel cukai rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 18. Pengaruh cukai rokok terhadap konsumeii rokok

Pembahasan

1. Pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi rokok

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara parsial atau individual variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Hasil ini mempunyai makna bahwa setiap terjadi kenaikan angka kemiskinan atau naiknya jumlah penduduk miskin, maka konsumsi rokok di Indonesia akan menurun dan sebaliknya. Sebagaimana diketahui bahwa

kebiasaan merokok tidak mempertimbangkan aspek kemiskinan seseorang karena merokok sebagai rasa kepuasan tersendiri bagi para perokok. Hal ini dikarenakan kemiskinan sebagai suatu yang harus dijalani oleh seseorang sehingga kebiasaan merokok tetap berlangsung walaupun terkadang seseorang harus mempertimbangkan kondisi keuangan ketika orang tersebut akan membeli rokok. Keputusan ini sebagai salah satu tindakan yang sering dilakukan oleh seseorang ketika

orang tersebut dalam kondisi yang kurang memungkinkan untuk membeli rokok.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian William dan Wilkins (2006) yang menyebutkan bahwa tembakau dan alkohol banyak disalahgunakan di Jerman oleh orang-orang yang berusaha melarikan diri dari masalah sehari-hari mereka. Kondisi ini memberikan makna bahwa orang-orang dengan status ekonomi lemah cenderung mengkonsumsi tembakau sebagai pelarian. Apabila masalah yang dihadapi semakin kompleks, maka konsumsi tembakau akan semakin meningkat. Hal ini mempunyai makna bahwa kemiskinan mempunyai hubungan positif terhadap konsumsi rokok atau tembakau.

Kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi (Sri Hastuti, 2009: 36) yaitu: 1) kemiskinan (*proper*): kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, 2) ketidakberdayaan (*powerless*): rendahnya pendapatan akan mempengaruhi kekuatan sosial (*social power*) dari masyarakat terutama dalam memperoleh keadilan maupun kesamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*): seseorang yang disebut miskin

tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi tak terduga dimana situasi ini dalam penyelesaiannya membutuhkan alokasi pendapatan, 4) ketergantungan (*dependence*): seseorang yang disebut miskin yang mengalami keterbatasan pendapatan dan tidak mempunyai kekuatan sosial maka tingkat ketergantungan terhadap pihak lain akan semakin tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan sumber pendapatan baru, sehingga bantuan dari pihak lain sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan akan sumber pendapatan, 5) keterasingan (*isolation*). Seseorang menjadi miskin karena disebabkan oleh faktor lokasi, dimana hal ini disebabkan oleh pembangunan fasilitas kesejahteraan yang tidak merata dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya persoalan tentang kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, namun juga perihal tentang tingkat kesehatan, pendidikan yang rendah, ketidakadilan dihadapan hukum, ancaman kriminalitas, dan ketidak-berdayaan melawan kekuasaan sehingga tidak mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.

2. Pengaruh harga rokok terhadap konsumsi rokok

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara parsial atau individual variabel harga rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Hasil ini mempunyai makna bahwa terjadinya kenaikan harga rokok, maka akan memberikan dampak negatif atau semakin menurunnya konsumsi rokok. Namun demikian, pada umum perubahan jumlah konsumsi rokok yang semakin menurun hanya berlangsung beberapa saat. Selain itu, realitas yang terjadi dimasyarakat, ketika harga rokok meningkat, perokok beralih pada produk rokok yang lebih murah.

Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aryasa Pratama (2018) dan Haifa Sari, Sofyan Syahnur, Chenny Seftarita (2017), yang menyatakan bahwa harga rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Harga rokok yang semakin meningkat akan menyebabkan menurunnya konsumsi rokok. Penurunan jumlah konsumsi rokok yang disebabkan karena kenaikan harga rokok tentunya tergantung pada masing-masing perokok. Namun ada kalanya perilaku masyarakat yang beralih pada rokok yang harganya lebih murah dari jenis rokok yang biasanya dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler (2012: 132) harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk produk itu. Sedangkan Kotler dan Keller (2012: 410) menyatakan harga harus mencerminkan nilai konsumen bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Dalam Kotler dan Armstrong (2013: 151) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat atas kepemilikan atau penggunaan suatu produk atau jasa tersebut. Pengertian dari penetapan harga menurut Alma (2011: 120) adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti dalam jangka waktu tertentu, sedangkan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2005: 142) menyatakan bahwa suatu perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan.

3. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap konsumsi rokok

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara parsial atau individual variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Hasil ini mempunyai makna bahwa ketika pendapatan per kapita meningkatkan

maka konsumsi rokok akan cenderung tetap. Pada dasarnya pendapatan nasional merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya suatu pendapatan nasional mempengaruhi pendapatan perkapita suatu negara, namun jumlah penduduk suatu negara juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di suatu negara dikatakan maju secara merata apabila pendapatan perkapitanya besar. Meskipun pendapatan nasionalnya tinggi, namun jika tingginya pendapatan nasional itu diikuti oleh tingginya jumlah penduduk, maka bukan tidak mungkin negara tersebut hanya maju secara pendapatan namun miskin secara rumah tangga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu Negara.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Likha Inayati (2018) dan Rizky Aryasa Pratama (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok. Pada dasarnya pendapatan nasional merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya suatu pendapatan nasional mempengaruhi pendapatan perkapita suatu negara, namun jumlah

penduduk suatu negara juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di suatu negar dikatakan maju secara merata apabila pendapatan perkapitanya besar.

Menurut Sukirno (2004: 33) pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara.

4. Pengaruh cukai rokok terhadap konsumsi rokok

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa secara parsial atau individual variabel cukai rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Hasil ini mempunyai makna bahwa ketika

pendapatan cukai rokok meningkat maka konsumsi rokok akan menurun. Hal ini dikarenakan konsumen akan mempertimbangkan besaran cukai rokok yang ditetapkan negara ketika seseorang membeli rokok.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Likha Inayati (2018) dan Jin E. Kim, PhD; Janice Y. Tsoh, PhD (2016), yang menyatakan bahwa cukai rokok tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Negara melakukan pembatasan konsumsi rokok dengan tujuan atau alasan kesehatan sehingga menggalakan slogan-slogan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok. Kondisi ini tentunya akan menyebabkan tidak adanya perubahan jumlah perokok sehingga konsumsi rokok cenderung tetap dan walaupun ada perubahan atau penambahan perokok, jumlahnya relatif dan tidak signifikan.

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang Cukai yang merupakan penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan keseimbangan. Pengertian cukai

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut tentang barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang-barang sebagaimana dimaksud diatas dinyatakan sebagai barang kena cukai. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai. Jumlah cukai yang dihitung berdasarkan system *tariff advalorum* adalah sebesar perkalian antara presentase tarif cukai dikalikan dengan harga dasar. Harga dasar yang digunakan untuk penghitungan cukai hasil tembakau adalah harga jual eceran (HJE). Sesuai Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai nomor Kep-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau. Pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau untuk pemasaran di dalam negeri wajib dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanent.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, valutas asing dan leverage terhadap return saham, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok, sehingga ketika kemiskinan semakin meningkat, maka konsumsi rokok akan semakin menurun.
- 2) Harga rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok, sehingga ketika harga rokok mengalami kenaikan, maka konsumsi rokok akan semakin menurun, walaupun hanya beberapa waktu.
- 3) Pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok, dimana ketika pendapatan per kapita meningkat, maka konsumsi rokok akan cenderung tetap.
- 4) Cukai rokok berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok, ketika cukai rokok semakin meningkat, maka konsumsi rokok akan semakin menurun.
- 2) Harga rokok yang tinggi akan cenderung mengurangi konsumsi rokok sehingga perlu penetapan rokok yang lebih mahal untuk memtasi konsumsi rokok.
- 3) Pendapatan negara dari cukai rokok selalu meningkat, namun perlu dibuat regulasi sehingga dapat meminimalkan konsumsi rokok namun pendapatan negara tetap tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchari, Alma. 2010. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Penerbit Alfabeta : Bandung.
- Basu Swastha dan Handi Irawan. 2010. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*. Jilid Kedua. Edisi Pertama. Liberty: Yogyakarta
- Basu Swastha. 2011. *Asas-Asas Marketing*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl Mc. Daniel. 2011. *Pemasaran*. Buku 1. Edisi Pertama. Salemba Empat : Jakarta.
- Husein Umar, 2012, *Metode Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran* (dilengkapi dengan 8 bahasan komprehensif kasus pemasaran, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Imam Ghozali. 2009. *Analisis Multivariat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Kasmir. 2013. *Manajemen Pemasaran dalam Perbankan*. Jilid Pertama. Edisi Kesembilan. PT Prenhallindo : Jakarta.

Saran

Berdasarkan hasil tersebut, maka saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam mengatasi kemiskinan, disarankan agar setiap orang berusaha meningkatkan pendapatan secara swadaya dan pemerintah sebagai fasilitator.

- Kotler, Philip dan Armstrong. 2010. Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid I. Edisi 3. Erlangga : Jakarta.
- Kotler. Philip & Keller, Kevin Lane, 2009, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, jilid 1,2, Erlangga; Jakarta
- Kotler. Philip. 2010. Manajemen Pemasaran. Jilid II. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Loudon, David dan Albert J. Delta. Bitta. 2011. Consumer Behavior, Concept and Application. Second Edition. Singapore: McGraw-Hill.
- Peter, J. Paul dan Jerry C. Olson. 2010. Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Edisi Keempat. Erlangga : Jakarta,
- Philip Kotler. 2010. Manajemen Pemasaran. Jilid II. Edisi Kelima. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Sunarwan, Ujang. 2012. Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran). Ghalia Indonesia: Bogor.
- Sutisna. 2011. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Cetakan Ketiga. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Tedy Pawitra. 2009. Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran dalam Perspektif Ekonomi Global. Cetakan Ketiga. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Tjiptono, 2012. Strategi Pemasaran Jilid Kedua Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset: Yogyakarta.
- William J. Stanton 2011. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Terjemahan. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Zeithaml V.A., A. Parasuraman, and L.L. Berry, 2008 "Delivery Quality Service Balancing Customer Perceptions and Expectation". New York: The Free Press.